



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



PERIODE 02 OKTOBER 2023

-Biro Humas dan Informasi Publik-



Title	"Food Security" Adalah Keamanan Nasional, Lebih Penting dari Persenjataan	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	YK/SB/ers/N-3	

Kebijakan Pemerintah | Jangankan Swasembada, untuk Tidak Impor Pangan Saja Kita Sangat Kesulitan

"Food Security" Adalah Keamanan Nasional, Lebih Penting dari Persenjataan

» Pertanian sekarang kondisinya memprihatinkan karena tidak ada lagi anak muda yang ingin menjadi petani. Harus ada reformasi kebijakan agar dunia pertanian menarik untuk digeluti anak muda.

JAKARTA – Kondisi pangan di Tanah Air sangat mengkhawatirkan sebab telah lama terjadi pembiaran pangan nasional dikuasai oleh para pedagang yang mengandalkan impor. Petani sebagai prajurit pangan Tanah Air dan tanah sebagai senjatanya dibiarkan mati pelan-pelan oleh serbuan impor pangan.

"Bahkan pembangunan bendungan yang digembor-gemborkan untuk mengairi sawah, yang terjadi malah di masa kemarau ini kering. Lihat saja Bendungan Jatigede di Jabar sekarang, kering, bekas jalan raya dan perkampungan yang dijadikan bendungan kini muncul lagi. Artinya apa? Artinya rakyat bisa menduga soal pangan sampai bendungan itu proyek saja, *rent seeking*, bukan bagaimana *food security* kita terjaga," kata pengamat pertanian dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Rudi Casrudi, kepada *Koran Jakarta*, Minggu (1/10).

Rudi tak habis pikir dari tahun ke tahun produksi pangan Tanah Air terus turun dan impor terus membesar. Rakyat bisa mengatakan para pemimpin negeri ini telah melakukan hal subversif karena menghancurkan *food security*. Kalau pemimpin tidak mengerti *food security* adalah keamanan nasional, ya bukan pemimpin, tapi pedagang.

"Karena tanpa kedaulatan pangan, negara bisa *kolaps*. Pemimpin harus tahu bahwa pangan lebih penting dari persenjataan nasional. *Nah*, bagaimana mungkin swasembada kalau yang dibesarkan adalah *rent seeking* impor pangan?" tandas Rudi.

Ketahanan apalagi kedaulatan pangan tidak akan pernah dimulai karena negara membiarkan semua pejabat pengambil keputusannya adalah para *rent seeker* impor pangan. Impor gandum 100 persen dibiarkan terus membesar kuantitinya. Kedelai produk petani lokal hanya cukup untuk konsumsi sebulan, artinya 11 bulan lainnya harus impor. Pangan lokal dibiarkan hancur dan semua jadi pemakan beras.

"Sementara tanah dibiarkan diubah menjadi beton, menjadi perumahan dan real estat. Pendiri bangsa kita, Sutan Sjahrir, sudah bilang bahwa negara kita adalah negara pangan, tapi pemimpin hari ini terus mengkhianatinya dengan mematkan petani dan tanah subur," papar Rudi.



PAMERAN INOVASI PRODUK PANGAN | Pengunjung memilih bahan pangan yang ditampilkan dalam Pangan Plus Expo 2023 di Jakarta, Sabtu (30/9). Pameran ini bagian dari Rakernas IV PDI Perjuangan yang menampilkan inovasi produk pangan, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Impor Beberapa Komoditas Pangan 2022 (juta dollar AS)



Sumber: BPS, Kemendag – Litbang KJ/and

Reformasi Kebijakan

Sementara itu, Guru Besar Kebijakan Publik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Antun Mardiyanta, mengatakan untuk mencapai *food security* atau ketahanan pangan di Indonesia, harus ada reformasi kebijakan yang lebih memihak kepada petani. Reformasi kebijakan harus dilakukan dan segera diwujudkan karena *food security* adalah keamanan nasional, lebih penting dari persenjataan.

"Pertanian sekarang kondisinya memprihatinkan karena tidak ada lagi anak muda yang ingin menjadi petani. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan agar dunia perta-

nian menarik untuk digeluti, terutama bagi anak muda," kata Mardiyanta.

Mardiyanta mengingatkan harus ada pemihakan, pemerintah harus mengutamakan kepada petani. Indonesia ini negara agraris, seharusnya banyak petani muda yang berkecimpung di situ karena kondusif tanahnya. *Nah*, pemihakan itu masih kurang jelas.

"Bukan hanya soal impor, sampai pada urusan subsidi pupuk pun kurang memihak ke petani. Banyak kepentingan-kepentingan yang bermain di situ, sehingga kebutuhan petani tidak bisa diamankan. Petani akhirnya dirugikan, tidak ada kebijakan yang memihak. Harga beras juga dikendalikan sedemikian rupa sehingga merugikan petani," tutur Mardiyanta.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan salah satu masalah oligarki pangan yang terjadi di Indonesia karena ada *rent seeking* pangan, terkait perdagangan atau tata niaga pangan, terutama impor pangan. Mereka berjaln dengan mafia atau kartel pangan. "Kondisi ini harus menjadi pelajaran rezim berikutnya. Kedaulatan pangan bukan saja soal produksi pangan lokal, juga soal demokratisasi pangan, khususnya tata niaga atau distribusi pangan," ungkap Awan.

Sedangkan pengamat ekonomi Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Esther Sri Astuti, mengingatkan swasembada pangan tidak akan tercapai kalau tidak ada *good will* dari pemerintah, termasuk kalau kental dipengaruhi *rent seeker* impor pangan.

Dengan kata lain, tambah Esther, regulasi ke arah pencapaian swasembada pangan harus diwujudkan, seperti pupuk yang dibuat murah dan mudah diakses petani. Hasil riset antara perguruan tinggi

dan pemerintah kemudian diproduksi oleh koperasi-koperasi, sehingga pupuk bisa diproduksi secara masal dan murah. Petani pun mudah mengaksesnya. Bukan seperti pupuk yang sekarang, diproduksi pabrik dan mahal harganya sehingga kadang terjadi kelangkaan pupuk.

"Jadi kebijakannya untuk jangka panjang, bukan jangka pendek yang memenuhi kebutuhan pangan dari impor. Karena para *rent seeker* itu berharap rupiah dari setiap kilogram bahan pangan yang diimpor," tegas Esther.

Lebih spesifik, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan jika dilihat apa yang terjadi sekarang, praktik *rent seeking* sudah berjalan lama di Indonesia sehingga keadilan bagi petani sangat sulit terwujud. *Rent seeking* selama ini terkesan dibiarkan bahkan dilanggengkan sehingga mimpi swasembada pangan sulit terealisasi.

"Jangankan swasembada, untuk tidak impor pangan (beras) kita sangat kesulitan. Jika dilihat data Bulog per Agustus 2023 saja, pemerintah sudah melakukan impor beras sebanyak 1,6 juta ton (dengan total nilai mencapai sembilan triliun rupiah) dari total penugasan 2,3 juta ton. Jumlah itu mencakup 300 ribu ton dari sisa penugasan tahun 2022 dan dua juta ton dari penugasan 2023," paparnya.

Badiul mengatakan *rent seeking* kerap kali mengakibatkan terjadinya korupsi. Untuk itu, pemerintah harus lebih terbuka lagi terkait informasi dan data pangan, termasuk impor pangan, memperkuat reformasi birokrasi agar para penyelenggara negara tidak memperkuat *rent seeking* dan yang tidak kalah penting penegakan hukum atas praktik *rent seeking*. ■ YK/SB/ers/N-3

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	LPDB-KUMKM Danai Hilirisasi Bawang Merah di Brebes	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Ant/E-10	

LPDB-KUMKM Danai Hilirisasi Bawang Merah di Brebes

JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung program hilirisasi komoditas bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Direktur LPDB-KUMKM Supomo, dalam keterangan resmi pada Jumat (29/9), menjelaskan dukungan yang diberikan berupa bantuan dana untuk hilirisasi bawang merah kepada Koperasi Pemasaran Unit Desa (KPUD) Wanasari dan PT Sinergi Brebes Inovatif.

“Dukungan LPDB-KUMKM dalam hal ini adalah memberikan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,08 milyar kepada KPUD Wanasari untuk meningkatkan nilai tambah komoditas bawang merah menjadi produk turunan seperti bawang goreng, bawang crispy, pasta bawang, dan tepung bawang,” kata Supomo.

Selain itu, program hilirisasi dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi bawang merah disepanjang tahun. Supomo menambahkan, pembiayaan tersebut merupakan yang perdana untuk mendukung program hilirisasi komoditas bawang merah.

“LPDB juga bisa menyiapkan pendanaan untuk modal kerja dan untuk investasi, kita bisa indirect loan kepada PT Sinergi Brebes Inovatif melalui koperasi di Wanasari ini,” ujar Supomo.

Sementara itu, Ketua KPUD Wanasari Jauhari mengapresiasi dukungan optimalisasi hasil produk pertanian bawang merah dari Kementerian Koperasi dan UKM (KemKopUKM), LPDB-KUMKM, serta Bank Indonesia.

Saat ini pihaknya sedang mengupayakan untuk menciptakan produk turunan bawang merah dalam bentuk tepung.

Jauhari mengungkapkan dari hasil uji coba produksi tepung bawang merah yang telah dilakukan ternyata peminat dari luar negeri terutama Uni Eropa sangat besar.

Namun, KPUD Wanasari bersama PT Sinergi Brebes Inovatif terkendala oleh peralatan yang digunakan untuk memproduksi tepung bawang merah.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan dari sisi petani bawang merah perlu meningkatkan produktivitas dan terkonsolidasi melalui wadah koperasi agar pengendalian harga saat panen raya atau masa paceklik bisa teratasi dengan baik. ■ **Ant/E-10**

Title	PBB Adopsi Rencana untuk Kurangi Bahaya Bahan Kimia	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	4	
Author	SB/AFP/I-1	

PBB Adopsi Rencana untuk Kurangi Bahaya Bahan Kimia

PARIS – Sebuah peta jalan baru untuk mengurangi risiko lingkungan akibat bahan kimia dan limbah diadopsi pada konferensi PBB yang digelar pada Sabtu (30/9) sebagai bagian dari upaya untuk mengelola paparan bahan kimia yang merusak.

Kerangka Kerja Global tentang Bahan Kimia diadopsi oleh pemerintah, perusahaan, dan LSM pada Konferensi Internasional tentang Pengelolaan Bahan Kimia yang kelima, yang diadakan di Bonn, Jerman, dan diselenggarakan oleh Program Lingkungan PBB (UNEP).

Rencana tersebut menetapkan 28 target dan pedoman konkret untuk sektor-sektor utama di seluruh siklus hidup bahan kimia, mulai dari produksi hingga limbah. Upaya tersebut termasuk mencegah perdagangan ilegal bahan kimia dan limbah, menerapkan undang-undang nasional, dan menghapuskan secara bertahap pestisida yang sangat berbahaya di bidang pertanian pada tahun 2035.

Rencana ini juga menyerukan transisi ke bahan kimia alternatif yang lebih berkelanjutan, pengelolaan bahan kimia yang bertanggung jawab di sektor-sektor seperti industri, pertanian dan layanan kesehatan, dan untuk lebih banyak akses terhadap informasi tentang risiko terkait berbagai bahan kimia.

“Setiap orang di planet ini harus dapat hidup dan bekerja tanpa takut jatuh sakit atau meninggal akibat paparan bahan kimia,” kata Inger Andersen, direktur eksekutif UNEP, seraya menyerukan agar pemerintah, industri kimia dan semua orang yang terlibat untuk melakukan tindakan melampaui apa yang telah disepakati untuk melindungi manusia dan planet tempat kita semua bergantung. ■ **SB/AFP/I-1**



Inger Andersen
Direktur eksekutif UNEP

AFP/SIA KAMBOU

Title	PDIP: Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	3	
Author	Ant/S-2	

Rakernas Parpol | Megawati Soroti soal Penebangan Pohon di Indonesia

PDIP: Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat

Rakernas IV PDIP merekomendasi agar seluruh keanekaragaman dan kekayaan sumber pangan dapat menjadi salah satu lambang supremasi kepemimpinan Indonesia di dunia.

JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan menghasilkan sembilan rekomendasi terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada penutupan Rakernas di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10). Hasto mengungkapkan bahwa partainya menempatkan persoalan pangan sebagai isu ideologis. Pasalnya, Presiden Pertama Indonesia Soekarno berpesan, "Pangan berkaitan dengan mati hidupnya suatu bangsa".

Untuk itu, PDIP memberikan rekomendasi agar ke depan seluruh keanekaragaman dan kekayaan sumber pangan, baik dari darat maupun laut, dapat menjadi salah satu lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia.

Pertama, pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia, meliputi diversifikasi pangan lokal; peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi; konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan.

Kedua, sambung Hasto, Rakernas IV PDIP merekomendasikan agar beberapa hal terkait kebijakan politik kedaulatan pangan untuk diterapkan terlebih dahulu oleh tiga



PENUTUPAN RAKERNAS PDIP Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) berjalan didampingi Ketua DPP Prananda Prabowo (kedua kanan) saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10). Rakernas IV PDI Perjuangan menghasilkan sembilan poin rekomendasi eksternal tentang kedaulatan pangan dan delapan rekomendasi eksternal tentang pemilihan pemilu.

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

pilar partai di setiap tingkatan dan disertai dengan gerakan mengkonsumsi pangan lokal termasuk 10 makanan pendamping beras seperti henjali, talas, sukun, jagung, sagu, sorghum, pisang, porang, ubi, dan singkong.

"Ketiga, Rakernas IV PDIP mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih dan lainnya," jelas dia.

Rekomendasi keempat terkait pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kemudian, kelima, mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan.

Keenam, mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis tanaman pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai dua juta varietas, dan mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia.

"Ketujuh, Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemeta-

an lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan" ucap Hasto.

Kedelapan, merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi Bank Pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan.

Kesembilan, menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan.

Program Penghijauan

Ketua Umum (Ketum) PDIP

Megawati Soekarnoputri menyoroti maraknya penebangan pohon di Indonesia, di mana negara lain terutama di Timur Tengah justru berbondong-bondong melakukan penghijauan.

Menurutnya, negara-negara di Timur Tengah itu bisa melakukan penghijauan karena ada daya juang yang kuat. Mereka ingin negaranya menghasilkan penghijauan bagi bumi.

Kondisi ini berbeda dengan Indonesia lantaran menebangi pohon yang sedang bertumbuh. Untuk itu, Presiden Kaelan Indonesia itu bertanya apakah tidak malu melakukan penebangan pohon. Padahal, sebuah pohon bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak. ■ Ant/S-2

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMERTAN**

Title	Pengetatan Pasar Global Momentum Pacu Produksi	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ers/E-10	

Kemandirian Pangan | Fenomena El Nino Sebabkan Puso di Beberapa Daerah

Pengetatan Pasar Global Momentum Pacu Produksi

Pengetatan pasar global menjadi momentum untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengintensifkan pemanfaatan teknologi.

JAKARTA – Langkah 22 negara yang menghentikan ekspor pangan menjadi momentum bagi Indonesia meningkatkan produksi pangan. Hal itu demi tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan.

Pengamat Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika pangan berdaulat, negara bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendasar dan urgent. Negara hadir dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Berdaulat juga berarti tidak ketergantungan dengan impor negara lain.

"Dalam beberapa komoditas, kita memang masih membutuhkan peran negara lain. Tetapi pangan dasar seperti beras, pemerintah harus berupaya untuk berdaulat," paparnya kepada *Koran Jakarta*, Minggu (1/10).

Menurut Huda, siapa pun presidennya, persoalan pangan

akan tetap ada dan mungkin eskalasinya semakin besar.

"Stop ekspor pangan hingga ketersediaan *input* bisa menjadi tantangan ke depannya. Maka kedaulatan pangan harus dijalankan terutama yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Kedaulatan dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan kemudahan impor ini juga memanjakan pemerintah.

"Semoga pengetatan pasar ini menjadi momentum untuk mewujudkan kedaulatan pangan," tegas Qomar.

Dia menjelaskan sistem pangan global, dibuat oleh rezim pangan global untuk kepentingan perusahaan global. Mengembangkan sistem pangan lokal oleh masyarakat sendiri, menjadi satu satunya pilihan untuk mewujudkan sistem pangan yang berpihak pada rakyat.

"Dengan memasifkan teknologi teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya lokal, untuk peningkatan produksi," ucapnya.

Presiden Joko Widodo mengkhawatirkan bertambahnya negara yang menghentikan ekspor komoditas pangan dari 19 negara menjadi 22 negara.

Presiden mengakui situasi tersebut membuatnya ngeri karena terhentinya pasokan pangan dari negara tersebut akan berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri.

"Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerem semuanya, tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerem semuanya," kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Rakernas IV PDIP di Jakarta, Jumat, pekan lalu.

Jokowi menjelaskan sejumlah negara, seperti Uganda, Russia, Bangladesh, Pakistan, hingga Myanmar memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan pangan mereka, termasuk gandum dan beras.

Kepala Negara mengingatkan akibat Ukraina dan Russia menghentikan ekspor gandum mereka, salah satu negara maju di Eropa bahkan kekurangan bahan

pangan karena mahalnnya harga.

"Saya baca di sebuah berita, di satu negara maju di Eropa, anak-anak sekolah banyak yang sudah tidak sarapan pagi sekarang, karena kekurangan bahan pangan, karena mahalnnya bahan pangan," kata Jokowi.

Dia kembali menekankan krisis pangan bukanlah kondisi yang mudah untuk diselesaikan di tengah perubahan iklim yang nyata.

Musim kemarau yang panjang telah menyebabkan gagal panen, serta ancaman gagal panen akibat fenomena super El Nino di tujuh provinsi yang dapat memengaruhi pasokan pangan.

Rencana Matang

Karena itu, Presiden menegaskan perlunya visi taktis dan rencana yang matang, bahkan hingga 10 tahun ke depan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Apalagi, pertumbuhan penduduk di Indonesia naik 1,25 persen setiap tahun sehingga diperkirakan mencapai 310 juta penduduk pada 2030.

"Sekali lagi, pangan menjadi kunci seperti yang disampaikan Bung Karno. Pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa itu betul sekali," kata Jokowi. ■ **ers/E-10**

Title	DBH Sawit dan Pemulihan Lingkungan	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	11	
Author	Oktaviani D.B Hana	

DBH Sawit dan Pemulihan Lingkungan

Oktaviano D.B. Hana
oktaviano.donald@bisnis.com

Pemerintah pusat pada bulan lalu mulai menyalurkan dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit kepada 350 daerah dengan total anggaran Rp3,4 triliun.

Namun, kekhawatiran *se-konyong-konyong* menyeruak dari para pegiat perkebunan sawit dan akademisi terkait dengan penyaluran anggaran tersebut.

Pengawasan atas distribusi dan pemanfaatan DBH sawit menjadi perhatian khusus mereka. Harapannya, penyaluran DBH sawit sungguh diawasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga manfaatnya sungguh dirasakan petani sawit.

Selain itu, alokasi dana tersebut bisa sungguh memberikan dampak nyata bagi persoalan lingkungan yang dihasilkan oleh pelaku bisnis perkebunan sawit.

Industri sawit di satu sisi memang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Akan tetapi, kegiatan operasi dan produksinya membawa mudarat, khususnya bagi lingkungan.

Tanaman sawit yang rakus unsur hara dan membutuhkan air dalam jumlah masif mengganggu ekosistem. Hutan monokultur sawit pun menyebabkan hilangnya fungsi hutan alam sebagai pengatur tata air dan penghasil air.

“Supaya sebanding de-

ngan DBH yang diterima. Jadi, jangan sampai investor itu fasilitasnya dipermudah, tetapi dampak tidak dihitung dengan matang,” kata Purwadi, akademisi Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, kepada *Bisnis*, beberapa waktu lalu.

Pasalnya, pemerintah daerah memiliki sejumlah opsi untuk memanfaatkan DBH sawit. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit menetapkan bahwa DBH sawit digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Dalam hal ini, kegiatan lain yang dimaksud meliputi pendataan perkebunan sawit rakyat, penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsi alokasi anggaran DBH sawit untuk aktivitas hijau seperti rehabilitasi hutan dan lahan serta penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan ini patut menjadi perhatian pemerintah daerah. Setidaknya ada dua alasan yang mendasarinya.

Pertama, alokasi anggaran DBH sawit bisa melengkapi berbagai instrumen transfer fiskal berbasis ekologi yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dalam upaya transformasi ekonomi menuju Indonesia 2045.

Instrumen dana transfer yang berbasis ekologi di antaranya adalah DBH sumber daya alam (SDA) Kehutanan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DAK Nonfisik Biaya Layanan Pengelolaan Sampah, insentif fiskal yang mempertimbangkan kinerja pada lingkungan, dan hibah BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes.

Kedua, program perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi ukuran untuk alokasi DBH sawit selanjutnya.

PMK No. 91/2023, Pasal 12, menyebut bahwa alokasi DBH Sawit, dihitung berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil, serta berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

Poin terakhir itu diperinci pada Pasal 13, bahwa kinerja pemerintah daerah dihitung berdasarkan indikator penurunan tingkat kemiskinan dan atau ketersediaan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan.

Dengan kata lain, makin besar pemanfaatan DBH sawit untuk aktivitas hijau maka kian besar pula potensi peningkatan anggaran tersebut pada periode berikutnya.

Title	DEFISIT KAKAO BERLANJUT, HARGA COKELAT BERSIAP NAIK	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	20	
Author	M. Taufik Basari	

| KOMODITAS PANGAN |

DEFISIT KAKAO BERLANJUT, HARGA COKELAT BERSIAP NAIK

Bisnis, JAKARTA — Harga kakao yang telah melonjak sekitar 47% dalam setahun terakhir bakal ikut mengerek harga cokelat dan menambah inflasi. Apalagi, panen yang dimulai bulan ini di Afrika Barat terancam kurang baik.

M. Taufik Basari
taufik.basari@bisnis.com

Lonjakan harga kakao setahun terakhir terjadi karena kekhawatiran bahwa cuaca buruk dan penyakit tanaman akan memengaruhi produksi di Pantai Gading dan Ghana, yang menyumbang dua pertiga dari pasokan dunia.

Fenomena cuaca El Nino bisa memperburuk keadaan, dan analisis memperkirakan defisit bakal terjadi lagi pada periode musim berikutnya, menjadikan kekurangan global dalam tiga tahun berturut-turut. Jika gagal panen di Afrika Barat benar-benar terjadi, harga cokelat bakal lebih mahal.

Hal itu berarti inflasi yang berasal dari makanan manis mungkin terus berlanjut meskipun tekanan harga untuk makanan secara umum mulai berkurang.

Produsen cokelat terkemuka seperti Hershey Co. dan Lindt & Spruengli AG telah memperingatkan tentang kenaikan harga lebih lanjut, dan ada tanda bahwa barang yang lebih mahal mengurangi permintaan dari Eropa hingga pasar berkembang penting di Asia.

"Situasi saat ini tampak cukup suram kecuali ada perbaikan dramatis dalam prospek. Kenaikan harga lebih lanjut bisa memengaruhi konsumsi," kata Darren Stetzel, wakil presiden komoditas lunak untuk Asia di broker StoneX dikutip *Bloomberg*, Minggu (1/10).

Harga kontrak kakao New York mencapai level tertinggi dalam 12 tahun pada pertengahan September, mendekati harga terakhir yang dilihat pada 1979, meskipun kemudian sedikit melandai lagi. Lonjakan harga ini dipicu oleh hujan yang berlebihan, hama, dan

wabah penyakit yang menyerang tanaman di Afrika Barat.

Pertanyaan kunci untuk saat ini adalah seberapa besar panen tahunan yang lebih besar, yang baru saja dimulai di Ghana dan akan dimulai di Pantai Gading.

Yves Kone, direktur di regulator industri Le Conseil Cafe-Cacao menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi sektor ini ke depan a.l. pemenuhan aturan pelacakan kakao Uni Eropa yang mengimpor 68% dari biji Pantai Gading, penyelundupan hasil produksi, dan perubahan iklim.

"Bahaya perubahan iklim mengancam kakao kami. Tugas ini tidak akan mudah karena kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga kakao dalam kondisi produksi yang baik," kata Kone di Abidjan.

Pada Juli, dilansir *Bloomberg*, Pantai Gading memperkirakan hasil dari musim utama yang berjalan dari 1 Oktober hingga Maret akan berkurang hampir seperlima dari tahun sebelumnya.

Jumlah tersebut masih bisa berubah setelah sejumlah petani menahan pasokan dari panen pertengahan yang lebih kecil dengan harapan harga yang lebih tinggi pada musim baru.

Negara tersebut menaikkan harga batas yang akan diterima petani mulai Minggu ini sebesar 11% menjadi 1.000 CFA franc (US\$1,61) per kilogram, jauh dari harapan petani akan kenaikan sebesar 44%.

Analisis di Rabobank dan Marex memperkirakan produksi Afrika Barat akan turun pada musim 2023-2024. Marex memperkirakan defisit global sebesar 279.000 ton, lebih besar dari dua defisit sebelumnya yang digabungkan.

Pasar yang ketat tercermin sepanjang rantai pasokan. Pabrik kakao di seluruh dunia telah memperlambat pengolahan biji menjadi produk yang digunakan dalam

makanan manis.

Pedagang Cargill Inc. baru-baru ini mengatakan harga yang tinggi mulai mempengaruhi peningkatan permintaan di Asia, dan penggiling Swiss Barry Callebaut AG pada Juli melaporkan penjualan yang lebih rendah.

Panen Afrika juga terhambat karena petani menghadapi biaya yang lebih tinggi atau kekurangan input seperti pupuk dan pestisida. Banyak di antara mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan upah mereka ditetapkan oleh pihak berwenang, yang berarti mereka tidak langsung mendapatkan manfaat dari harga kontrak yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut menjadikan lebih sulit untuk meningkatkan atau mengganti pohon yang rusak. Menurut kepala penelitian di Tropical Research Services Steve Wateridge, penyakit *swollen-shoot* adalah ancaman yang paling diremehkan terhadap produksi di produsen teratas Pantai Gading, memengaruhi sekitar seperlima dari panen negara tersebut.

Untuk musim baru di Pantai Gading, petani di daerah Daloa memprediksi panen yang lebih kecil karena kurangnya polong. Sementara mereka di San Pedro mengatakan panen akan tertunda setelah hujan membanjiri perkebunan, meskipun beberapa petani Pantai Gading akan menuai panen yang lebih besar karena pohon-pohon muda yang lebih tahan terhadap penyakit.

Di sisi lain, kurang lebih 10% dari panen musim lalu hilang di Kwarabeng, Ghana, utara Accra, terutama karena penyakit *black-pod* dan kurangnya bahan kimia. Ada risiko bahwa pohon yang menuai berarti produksi Ghana sekarang sedang menurun.

Namun, petani Ghana mendapat dorongan setelah negara tersebut,



Bahaya perubahan iklim mengancam kakao kami.

yang memulai musim baru tiga minggu lebih awal untuk mengatasi gangguan penjualan, menaikkan upah mereka lebih dari 60% untuk mencegah penyelundupan ke Pantai Gading dan mendorong investasi. Hal ini bisa mengarah pada produksi yang lebih tinggi.

Akan tetapi mungkin memerlukan waktu agar peningkatan produksi berpengaruh pada harga yang lebih rendah, dan masih ada kekhawatiran bahwa pola cuaca El Nino bisa menyebabkan kekeringan pada akhir musim dan mengancam panen.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa aturan deforestasi baru Eropa akan berdampak pada peningkatan biaya untuk industri cokelat – dan akhirnya konsumen.

Untuk saat ini, bagaimana panen Afrika Barat berjalan akan menjadi faktor utama penentu harga kakao.

"Cokelat adalah barang mewah sehingga tidak selalu mengikuti korelasi elastis harga terhadap permintaan. Namun, harga yang lebih tinggi pada akhirnya berarti konsumen yang lebih sedikit," kata Stetzel dari StoneX.

INDUSTRI COKELAT

Sebelumnya *Bloomberg* melaporkan bahwa pabrik kakao di seluruh dunia mulai melambat dengan cepat, menandakan bahwa situasi terburuk bagi pembuat cokelat mungkin belum berakhir. Pengolahan biji kakao di Amerika Utara turun hampir 12% pada

kuartal kedua, terendah untuk periode tersebut sejak setidaknya 2008. Di Eropa dan Asia, pabrik penggiling kakao tercekil sejak pandemi global ketika lockdown dan pengurangan perjalanan udara mengurangi permintaan cokelat.

Menurut data dari perusahaan riset konsumen Euromonitor International Plc., angka-angka tersebut menandakan masalah bagi industri cokelat global bernilai US\$117 miliar, yang mengalami penurunan volume penjualan untuk pertama kalinya dalam enam tahun pada 2022.

Pabrik memotong produksi karena harga kakao yang tinggi menekan margin saat inflasi menyulitkan konsumen.

"Masalah permintaan cukup banyak. Bukan hanya harga kakao yang tinggi, tetapi harga gula juga tinggi, dan produsen selalu mencari cara untuk memenuhi margin dan berusaha untuk mengurangi jumlah cokelat chip dalam kue, atau mereka mengurangi ukuran batang," kata Judy Ganes, presiden konsultasi J. Ganes Consulting.

Pabrik biasanya mengolah kakao beberapa bulan sebelum produk diubah menjadi cokelat. Hal ini berarti perlambatan kemungkinan menandakan industri mengantisipasi permintaan yang lebih rendah di masa depan.

Barry Callebaut AG, pembuat cokelat massal terbesar di dunia, mengatakan bahwa volume penjualannya turun 2,7% dalam 9 bulan pertama tahun ini, dengan bisnis gourmet dan spesialisnya mengalami penurunan terbesar.

Menurut National Confectioners Association pengolahan biji kakao di Amerika Utara turun menjadi 102.493 ton metrik pada kuartal kedua. Di Asia, penggilingan turun 6,5% dan menurun 5,7% di Eropa. ☐



Harga kontrak berjangka kakao sempat mencapai level tertinggi dalam 12 tahun di kisaran US\$3.800 per ton di tengah kekhawatiran akan pasokan yang ketat di Afrika Barat. Namun harga kemudian melandai karena kuatnya dolar AS dan prospek ekonomi global yang lemah.

Sumber: Bloomberg

BISNIS/SINTA NOVIZAH



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Performa Ciamik PIP di Bali Nusra	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	14	
Author	Harian Noris Saputra	

| KREDIT ULTRA MIKRO |

Performa Ciamik PIP di Bali Nusra

Bisnis, DENPASAR — Penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha ultramikro di wilayah Bali dan Nusa Tenggara cukup apik lantaran mampu menjangkau 495.500 nasabah.

Bahkan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mencatat total penyaluran kepada pelaku usaha ultramikro di wilayah ini mencapai Rp1,85 triliun.

Direktur Utama PIP Ismed Saputra menjelaskan bahwa penyaluran di wilayah Bali saja melibatkan 10 lembaga penyalur, yakni PNM, Pegadaian, KSPS UGT Sidogiri, KSP Sari Sedana, KSP Sila Mukti KSP Jujur Utama Mandiri, KSU Krama Bali, KSP Guna Prima, PT REFI, dan LKM Genta Persadha.

Dia mengungkapkan bahwa dengan melibatkan 10 lembaga penyalur bukan bank (LKBB) tersebut, PIP mampu menggeliatkan UMKM di seluruh Bali.

Adapun, imbuhnya, penyaluran pembiayaan terbanyak ada di Kabupaten Buleleng yang merupakan daerah dengan penduduk terbesar di Bali dan merupakan daerah yang memiliki banyak pelaku usaha ultramikro.

“Sebagian besar pelaku usaha yang menjadi debitur adalah perempuan dengan persentase sebesar 95%, sisanya baru laki-laki,” jelasnya di Denpasar, pekan lalu.

Menurutnya, PIP juga memberikan pendampingan terhadap para pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan. Pendampingan ini berupa pelatihan tentang usaha yang debitur tersebut geluti, pelatihan pembukuan keuangan, *branding* produk, hingga pemasaran *online*.

Ismed mengatakan bahwa untuk inkubasi, pihaknya juga memberikan pelatihan pada aspek pemenuhan legalitas, peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengelolaan keuangan dan pemasaran produk.

Sementara, imbuhnya, PIP juga memberikan dukungan melalui promosi di media sosial PIP, *marketplace*, lelang produk *online*, gerai Umi di pusat perbelanjaan dan publikasi melalui media massa.

“Kalau pemberdayaan, kami melakukannya berbasis komunitas dan terintegrasi pada sektor pertanian dan kerajinan,” katanya.

PIP berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai pembiayaan kepada pelaku usaha ultramikro dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan seperti koperasi. (Harian Noris Saputra)

Title	REKOR TERENDAH INFLASI 2023	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	11	
Author	Maria Elena	

| PROYEKSI IHK SEPTEMBER |

REKOR TERENDAH INFLASI 2023

Bisnis, JAKARTA — Tingkat inflasi pada bulan lalu diprediksi mencatatkan angka terendah sepanjang tahun berjalan 2023. Selain pengendalian harga yang cukup solid, basis pembandingan pada tahun lalu yang terlampau tinggi menekan inflasi secara tahunan pada September 2023.

Maria Elena
maria.elena@bisnis.com

Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg mencatat, secara rata-rata inflasi September 2023 hanya 2,21% (year-on-year/YoY), dengan estimasi atas 2,45% dan estimasi bawah 2%.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, memproyeksikan tingkat inflasi September 2023 menurun menjadi 2,16% (YoY), disebabkan oleh hilangnya dampak dari *high-base effect* pada September 2022 lantaran penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Inflasi inti diperkirakan terus menurun, dari 2,18% [YoY] pada Agustus 2023 menjadi 2,05% [YoY] pada September 2023," katanya kepada *Bisnis*, Minggu (1/10).

Josua memperkirakan inflasi akan mencapai 2,6% pada akhir tahun ini karena rata-rata historis menunjukkan bahwa inflasi pada kuartal keempat biasanya memberikan kontribusi sekitar 1 poin

persentase—1,1 poin persentase terhadap inflasi umum.

Namun demikian, menurutnya, masih ada risiko yang perlu diwaspadai oleh pemangku kebijakan, terutama yang terkait dengan El Nino dan peristiwa cuaca ekstrem, yang dapat memberikan tekanan pada inflasi pangan.

"Secara bulanan, inflasi September 2023 sedikit naik didorong oleh penyesuaian harga minyak nonsubsidi sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia," jelasnya.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro, menambahkan inflasi September 2023 akan mencapai 2,25%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2023 yang mencapai 3,27%.

Sejalan dengan itu, Andry memperkirakan inflasi inti pada bulan lalu akan turun dari 2,18% pada Agustus 2023 menjadi 2,1% secara tahunan.

"Pada September 2023, inflasi *headline* diperkirakan 0,17% secara bulanan. Secara tahunan, inflasi diperkirakan 2,25%," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, memandang inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2023 secara bulanan amat rendah, bahkan mengarah ke zona deflasi.

Terlebih, inflasi secara tahunan diyakini mencatatkan penurunan hingga 3% dibandingkan dengan September 2022 yang menjadi puncak dari lesatan IHK akibat efek besar kenaikan harga BBM.

Di samping itu, inflasi harga bergejolak diestimasi lebih ramah pada bulan lalu seiring dengan

pengendalian harga yang cukup cermat dari pemerintah.

Akan tetapi, menurutnya, pemangku kebijakan patut mencermati dinamika yang terjadi pada pengujung tahun, terutama Oktober—Desember. Musababnya, secara historis inflasi pada periode ini cenderung meningkat.

Beberapa pendorong musiman antara lain libur akhir tahun hingga perayaan Natal dan Tahun Baru yang mengerek sisi permintaan barang dan jasa.

Tantangan makin berat karena pada warsa ini pemerintah juga disibukkan dengan berbagai persoalan politik dunia.

"November dan Desember inflasi biasanya naik lagi. Hal yang perlu diwaspadai penurunan stok pangan khususnya setelah

panen, biasanya menjelang akhir tahun," katanya.

Merespons ancaman inflasi pangan, pada 15 September 2023 otoritas fiskal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Dalam beleid itu, ada perubahan beberapa substansi yang cukup fundamental. Mulai

dari lembaga yang ditugaskan melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), besaran bunga yang disubsidi, hingga tenor atau periode pinjaman.

Sesuai regulasi *anyar* itu, Perum Bulog dan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan menjadi institusi yang ditugaskan melakukan pengadaan CPP.

Pemberi pinjaman pun diperluas dari sebelumnya hanya bank BUMN menjadi lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, pun menegaskan bahwa beleid

baru ini bertujuan memperluas kapasitas pembiayaan dari semula hanya Bank Himbara ke bank dan lembaga keuangan bukan bank secara umum. ■



Ramalan Inflasi September 2023 Kian Melandai



Inflasi pada September masih cukup menantang karena adanya faktor kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi.



Pada September 2023, inflasi *headline* diperkirakan 0,17% secara bulanan. Secara tahunan, inflasi diperkirakan 2,25%.



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERAN

Title	Prabowo Dan Wamentan Pelukan Di Lubang Buaya	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 1	
Author	UMM	

Isu Cekik-Mencekik Tak Rame Lagi

Prabowo Dan Wamentan Pelukan Di Lubang Buaya

MENTERI Pertanian Prabowo Subianto kembali membantah tuduhan telah mencekik Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi. Bantahannya bukan sekadar dengan pernyataan, tapi dengan pelukan, saat keduanya menghadiri upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023).

Momen Prabowo-Harvick pelukan itu, diabadikan dalam foto yang diunggah Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, di

akun Instagram *@budiariesetiadi*. Ada empat foto yang dibagikan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi itu. Tiga di antaranya ada Prabowo dan Harvick dalam satu frame. Dalam satu foto, Prabowo-Harvick berdiri berdampingan sambil saling tebar senyuman. Bahu kanan Harvick terlihat nempel ke Prabowo.

Dalam foto-foto itu, Prabowo mengenakan setelan jas abu-abu. Sementara Harvick memakai setelan jas biru. Selain Prabowo dan Harvick, ada Budi Arie, Menpora Dito Ariotedjo, Wakil

Ketua MPR Arsul Sani, dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.

"Foto-foto bersama Pak Menhan Prabowo Subianto setelah Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober di



LEBIH
LENGKAP
BERITA
PRABOWO
SCAN QR
CODE INI

Lubang Buaya," demikian keterangan yang dituliskan Budi Arie, di foto tersebut.

Sebelumnya, Prabowo bercerita soal isu miring yang kerap menyimpannya. Seperti tuduhan melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang wakil menteri.

Prabowo menjelaskan, hal semacam itu sudah biasa menyimpannya sejak menggeluti dunia politik. Ia pun tidak mau ambil pusing dengan hal tersebut, karena tujuannya berpolitik adalah mengabdikan bagi rakyat Indonesia.

"Saya sering dihujat, sering difitnah. Yang terakhir saya dibilang mencekik wakil menteri di rapat kabinet lagi," kata Prabowo, sambil geleng-geleng kepala di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9/2023).

Ketua Umum Partai Gerindra ini melanjutkan, hujatan juga pernah datang dari pendukungnya sendiri. Hal itu bermula saat dirinya memutuskan bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

♦ BERSAMBUNG KE HAL 4

Title	Prabowo Dan Wamentan Pelukan Di Lubang Buaya	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 12	
Author	UMM	

Prabowo Ngaku Sudah Biasa Dihujat Dan Difitnah

Prabowo Dan Wamentan

... DARI HALAMAN 1

Prabowo mengatakan, saat awal-awal bergabung di kabinet Jokowi, banyak pendukungnya yang kecewa dan menuduhnya pengkhianat. Sebab, Jokowi adalah lawannya dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Kepada para pendukungnya itu, Prabowo menegaskan, yang diperjuangkannya sejak lama tidak pernah berubah, meskipun memilih berada di dalam

pemerintahan. Dia mengklaim selalu konsisten mementingkan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

"Saya bukan membela diri, tapi saya mau menyampaikan, orang-orang yang mengatakan bahwa saya berkhianat bergabung Pak Jokowi, saya hanya mau katakan saya tidak pernah berubah," tegasnya.

Dia pun berharap, seiring berjalannya waktu, para pendukungnya akan memahami bahwa keputusannya adalah demi kemajuan bangsa dan negara. "Kalau lagu, lagu favorit saya itu judulnya 'aku

masih seperti yang dulu', kesetiaanku kepada rakyat tidak pernah luntur," canda Prabowo.

Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan isu yang menyebut ada seorang menteri menampar wakil menteri. Isu penamparan tersebut pertama kali disiarkan kanal YouTube *Sword TV* pada Minggu (17/9/2023), dengan konten berjudul "Alifurrahman: Ada Capres Nampar Wamen Di Ruang Rapat?"

Isu ini kemudian dibantah banyak pihak. Presiden Jokowi juga sempat angkat bicara dan memastikan tidak ada peristiwa

penamparan tersebut. Namun, sebagian pihak masih menggoreng isu itu.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan, foto Prabowo dan Harvick dalam satu frame jelas untuk menepis isu miring soal penamparan.

"Perihal ini menegaskan dan menguatkan pernyataan Prabowo dan Presiden Jokowi, kejadian kekerasan yang dialamatkan kepada Prabowo dan korbannya Harvick tak terjadi," ucap Agung, kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (1/10/2023). ■ UMM

Title	329 Penggilingan Miliki Stok Beras 133 Ribu Ton
Date	2 Oktober 2023
Media	Investor Daily
Page	12
Author	Tri Listiyarini



Kementerian Pertanian

329 Penggilingan Miliki Stok Beras 133 Ribu Ton

JAKARTA, ID—Pemerintah terus mendata stok gabah dan beras di penggilingan padi di Tanah Air. Hingga September 2023, sebanyak 329 dari 1.056 penggilingan padi besar nasional tercatat memiliki stok sebesar 133.739,31 ton setara beras. Data keberadaan stok di penggilingan itu diharapkan memberi psikologi positif terhadap aspek ketersediaan sehingga pasar beras menjadi lebih kondusif.

Oleh **Tri Listiyarini**

Dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penggilingan padi di Indonesia mencapai 169.789 unit, dengan rincian penggilingan skala kecil (PPK) 161.401 unit, penggilingan skala menengah (PPM/PPS) 7.332 unit, dan penggilingan skala besar (PPB) 1.056 unit. Pendataan usaha penggilingan padi nasional oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan amanat dari Peraturan No 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. Permentan itu merupakan tindak lanjut dari aturan turunan UU Cipta Kerja yakni PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pendataan usaha penggilingan beserta stok gabah/berasnya dilakukan Ditjen Tanaman Pangan Kementan bersama Satgas Pangan Polri. Prioritas pendataan adalah PPB dan PPS. Mengacu Peraturan No 15 Tahun 2021, penggilingan padi wajib melaporkan empat informasi ke Kementan melalui aplikasi Sistem Informasi Tanaman Pangan (Sitamp). Keempat informasi itu adalah suplai bahan baku, produk, harga dan penjualan/pemasaran, serta stok. Stok gabah dan beras yang dilaporkan menyangkut jenis suplai selama satu bulan, jumlah suplai, harga, dan rata-rata kadar air. Sedangkan beras yang dihasilkan juga harus dilaporkan dari sisi kelas mutu (premium, medium, dan beras pecah) serta jumlah produksinya.



Perkembangan Jumlah Penggilingan Padi di Indonesia Berdasar Skala Usaha (Unit)

Skala Usaha/Kapasitas Giling	Tahun 2012	Tahun 2020
● Kecil (Penggilingan Padi Kecil/PPK)	171.496	161.401
● Sedang/Menengah (Penggilingan Padi Sedang/Menengah/PPS/PPM)	8.628	7.332
● Besar (Penggilingan Padi Besar/PPB)	2.075	1.056
Total	182.199	169.789

Sumber: BPS/PPB

Menurut perwakilan dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementan Indah Sulistyorini, dalam rangka menstabilkan harga beras, upaya Kementan dari sisi hilir adalah melakukan penda-

taan stok atau suplai gabah di PPB dan PPS. "Informasi suplai seperti ini kami anggap penting karena di lapangan kini banyak penggilingan terutama PPS dan PPK di sentra produksi tidak mendapatkan bahan baku karena terjadi perebutan

gabah," ungkap Indah saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, baru-baru ini.

Dalam pantauan Kementan, hingga September 2023, dari total PPB sebanyak 1.056 unit yang telah melaporkan secara mandiri ke aplikasi Sitamp sebanyak 329 unit. Dari 329 PPB itu, total stok gabahnya 70.889,5 ton dan beras 89.200,5 ton, atau setara beras 133.739,31 ton. "Harapan kami, ke depan, seluruh penggilingan terutama penggilingan besar bersedia melaporkan suplai gabah dan juga stok berasnya. Dengan begitu, data yang diperoleh tersebut bisa memberikan semacam psikologi yang positif ke masyarakat terkait dengan ketersediaan beras di sisi penggilingan," papar Indah.

Sebelumnya, industri penggilingan padi nasional menyatakan mengalami kesulitan bahan baku akibat ketidakseimbangan kapasitas terpasang mesin dengan ketersediaan (produksi) gabah di lapangan. Sekjen Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Burhanuddin mengatakan, alternatif solusi yang *out of the box* untuk mengatasi hal itu adalah impor beras diganti impor gabah. Di sisi lain, selain ada operasi pasar beras, perlu juga operasi pasar gabah terutama saat PPK sedang kesulitan memperoleh gabah sehingga mendorong PPK beroperasi sesuai kapasitas.

Harga Melonjak

Sementara itu, dari pantauan petugas informasi pasar yang diterjunkan Ditjen Tanaman Pangan Kementan, rerata nasional harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada September 2023 mencapai Rp 6.810 per kilogram (kg), lebih tinggi dari Agustus 2023 sebesar Rp 6.016

per kg dan Februari 2023 yang hanya Rp 5.633 per kg. Harga terendah Rp 6.000 per kg terjadi di Bombana, Konawe, Gowa, dan Landak, sedangkan harga tertinggi Rp 7.800 per kg ada di Majalengka, Lombok Barat, dan Lombok Timur.

Sedangkan rerata nasional harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan pada September 2023 mencapai Rp 7.541 per kg, lebih tinggi dari Agustus 2023 sebesar Rp 6.919 per kg dan Februari 2023 sekitar Rp 6.355 per kg. Harga terendah Rp 7.000 per kg terjadi di Hulu Sungai Utara, Takalar, Jemeponto, dan Kotim, tertinggi Rp 9.000 per kg ada di Cilegon dan Agam. Untuk rerata nasional harga beras medium di tingkat penggilingan pada September 2023 sebesar Rp 11.917 per kg, lebih tinggi dari Agustus 2023 sebesar Rp 11.056 per kg. "Harga terendah untuk beras medium Rp 11 ribu per kg terjadi di Ogan Ilir, Sumenep, dan Gowa, tertinggi Rp 13 ribu per kg ada di Cirebon, Madina, dan Kukar," jelas Indah.

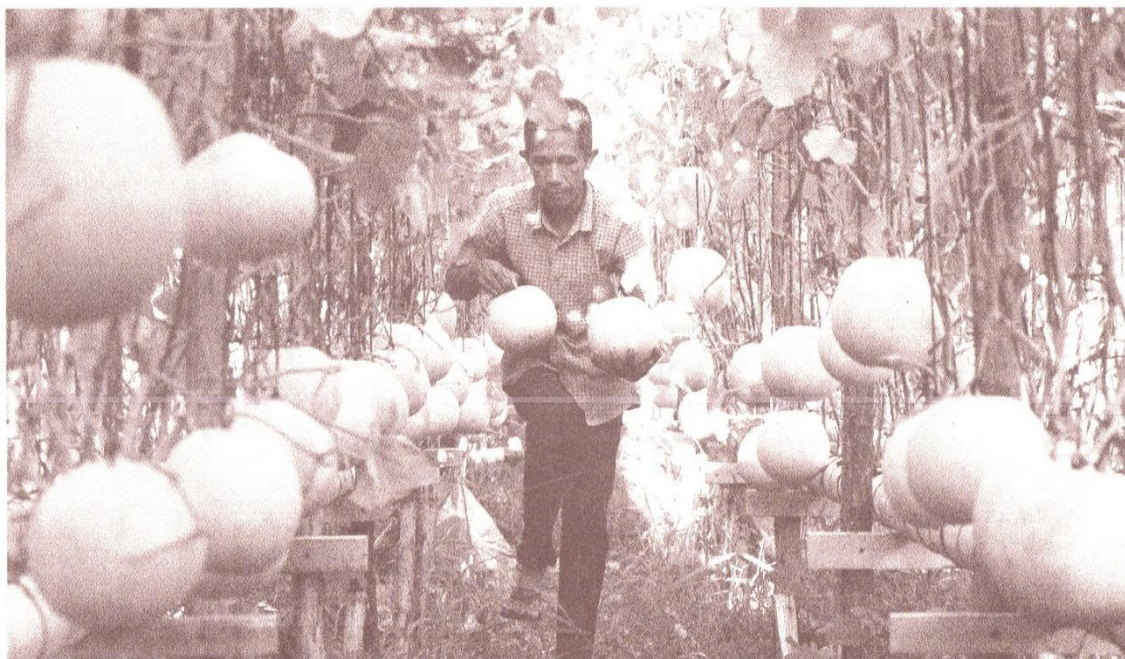
Kepala Badan Pangan Nasional/NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, kenaikan harga beras di konsumen tidak terlepas dari melonjaknya harga gabah di produsen. Naiknya harga gabah itu ditengarai akibat kurangnya stok di lapangan sehingga terjadi perebutan yang memicu peningkatan harga di petani. "Kalau kita lihat, petani happy dengan kenaikan harga gabah, tapi di tingkat penggilingan tidak bisa berjalan seperti biasa karena stok di lapangan terbatas. Dengan berkurangnya pasokan gabah ini, tugas kita bersama-sama mendorong kementerian teknis memacu produksi hingga akhir tahun," ujar Arief.

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTAN

Title	Budi Daya Melon Pola Tanam Hidroponik	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	Ant	

ANI



Budi Daya Melon Pola Tanam Hidroponik

Warga memanen buah melon madu jenis *honey globe* yang dibudiddayakan dengan pola tanam hidroponik di lahan telantar perkotaan, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (30/9/2023). Hasil budi daya melon madu dengan masa tanam hingga panen selama 60 hari itu dipasarkan dengan harga Rp25.000 per kilogram.

Title	Citi Kucurkan Dana Hibah untuk Ketahanan Pangan di NTT	
Date	2 Oktober 2023	
Media	Investor Daily	
Page	15	
Author	Ks	

Citi Kucurkan Dana Hibah untuk Ketahanan Pangan di NTT

JAKARTA, ID - Citi Foundation menyatakan, 50 organisasi termasuk dua dari Indonesia menerima hibah dari Global Innovation Challenge dengan total \$ 25 juta atau sekitar Rp 384 miliar. Ini sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan keuangan bagi keluarga serta komunitas berpenghasilan rendah di seluruh dunia.

Hibah dari Global Innovation Challenge merupakan sebuah model baru untuk mengidentifikasi dan memberikan dukungan filantropis kepada organisasi masyarakat yang mengembangkan solusi inovatif untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.

Para penerima hibah perdana Global Innovation Challenge masing-masing akan menerima \$ 500.000 atau setara dengan Rp 7,6 miliar untuk mendukung program yang berfokus pada empat area, yaitu: akses pangan, ketersediaan pangan, daya beli, dan ketahanan masyarakat.

Dana hibah diberikan untuk masa dua tahun dan selama periode ini, penerima hibah akan memiliki akses ke bantuan teknis dan komunitas pembelajaran yang difasilitasi oleh IDEO.org, sebuah studio desain nirlaba. Melalui layanan menyeluruh ini, penerima hibah akan memiliki kesempatan untuk berkolaborasi, berbagi pembelajaran, dan bertukar pengalaman.

CEO Citibank, N.A., Indonesia Batara Sianturi mengatakan, krisis pangan merupakan tantangan global yang sangat serius.

Data dari Citi Global Perspec-

tive & Solutions menyebutkan perkiraan dampak malnutrisi terhadap perekonomian global bisa mencapai \$ 3,5 triliun per tahun atau hampir \$ 500 untuk setiap orang di dunia, karena tingginya harga pangan dan faktor makroekonomi lainnya.

"Citi dan Citi Foundation membantu menjawab tantangan ini dengan memanfaatkan bisnis kami, sumber daya manusia, dan filantropi kami untuk mendukung solusi inovatif berskala global dengan memobilisasi aliran modal dan membiayai," kata Batara, belum lama ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Plan International Indonesia Dini Widiastuti. "Sebagai organisasi dengan pengalaman 20 tahun di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Plan Indonesia memandang kolaborasi ini sebagai peluang untuk membantu menjamin ketahanan pangan dan memperkuat kapasitas ekonomi petani muda, khususnya perempuan, di wilayah TTS," ujarnya.

Melalui dukungan dari Citi Foundation, pihaknya mampu meningkatkan kualitas hidup serta kemampuan petani muda dalam menghasilkan produk pertanian pangan yang sehat, untuk membantu mengurangi masalah *stunting* Indonesia.

"Sehingga memastikan pasokan pangan yang cukup bagi seluruh penduduknya adalah suatu tantangan yang serius," ujarnya.

Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO), pada 2022 terdapat sekitar 16,2 juta orang di Indonesia yang masih mengalami kelaparan atau ketidakpastian. **(ks)**

Title	KLHK Cari Solusi Cegah Kebakaran TPA Sampah	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	TI	

KLHK Cari Solusi Cegah Kebakaran TPA Sampah

JAKARTA, ID—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mengkaji solusi atau cara pencegahan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Hingga September 2023, telah terjadi kebakaran TPA Sampah di 16 kabupaten di Indonesia.

Menteri LHK Siti Nurbaya telah mengunjungi beberapa TPA Sampah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur melalui jalur darat pada 30 September-1 Oktober 2023. Kunjungan itu untuk menyelidiki penyebab kebakaran beberapa TPA Sampah dan mengkaji cara terbaik pencegahannya. “Tim KLHK menempuh jalan darat untuk incognito lapangan sehubungan dengan persoalan TPA Sampah yang terbakar. Terdapat variasi penanganan yang dilakukan pemda dan tim lapangannya,” ujar Menteri Siti dalam keterangannya usai mengunjungi TPA Sampah Kopi Luhur, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (30/09/2023).

Menteri Siti mengungkapkan, kejadian TPA Sampah terbakar tercatat di 16 kabupaten tahun ini. KLHK menegaskan, jalan keluar harus dicari, dari data di lapangan akan ditempuh langkah-langkah antarkebijakan untuk penyelesaiannya. “KLHK ingin melihat secara persis mengapa ada api. Karena ada teorinya juga, kalau ada gas metana, lalu ada angin kencang dan oksigen, itu pasti terbakar. Itu yang kita mau lihat, pelajari, dan kita tangani. Semoga ada jalan keluar yang baik dan cepat bisa diselesaikan,” kata dia.

Pada musim kemarau tahun ini, akibat cuaca panas dan angin kencang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kerap terjadi di beberapa lokasi, salah satunya di TPA Sampah. Kebakaran di TPA Kopi Luhur telah padam pada 29 September 2023. Kebakaran di TPA itu cepat padam karena cepat tertangani sehingga api tidak membesar dan meluas. Setelah dari TPA Kopi Luhur, Menteri LHK melanjutkan kunjungan ke TPA Pesalakan di Pemalang, Jawa Tengah, serta TPA Randegan di Mojokerto dan TPA Tlekung di Kota Batu Malang. “Kami cek *spot* satu per satu polanya apa dan bagaimana cara menanganinya,” tutur Siti.

Suhu udara belakangan ini terpantau meningkat dari normal. Hasil amatan BMKG, suhu maksimum terukur selama 22-29 September 2023 di beberapa wilayah RI cukup tinggi, levelnya 35-38°C pada siang hari. Suhu maksimum tertinggi pada periode itu ada yang mencapai 38°C, terukur di Kantor Stasiun Klimatologi Semarang pada 25 dan 29 September 2023 serta di Stasiun Meteorologi Kertajati, Majalengka, pada 28 September 2023. Berkaitan dengan beberapa kebakaran di TPA Sampah maupun karhutla di beberapa lokasi, Menteri Siti terus memantau perkembangannya. “Untuk kasus-kasus karhutla, termasuk TPA ini, pada dasarnya yang paling penting itu dimonitor, ditangani, dan jangan dibiarkan meluas,” papar Siti. **(tl)**

Title	Polda Gagalkan Penyelewengan Pupuk Subsidi	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	13	
Author	Tos/dri	

Polda Gagalkan Penyelewengan Pupuk Subsidi

Hendak Kirim ke Blora, Dicegat di Semarang

BLORA - Personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng menggagalkan upaya penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi. Mereka mengamankan sekitar 200 sak atau 10 ton pupuk bersubsidi dalam satu truk yang hendak dikirim ke Blora.

Kabidhumas Polda Jateng Kombespol Satake Bayu Setianto menjelaskan, personel kepolisian meng-

hentikan truk nopol K 9655 NE yang mengangkut pupuk subsidi itu di tol Kalikangkung, Kamis (28/9) malam. Truk tersebut berangkat dari Tegal dengan tujuan Blora, kemudian hendak berlanjut ke Bojonegoro, Jawa Timur.

"Saat mengeledah truk itu, personel menemukan muatan berupa 200 sak pupuk subsidi pemerintah. Setiap sak berisi 50 kg pupuk. Ada dua jenis pupuk bersubsidi di truk tersebut, yakni urea dan ponska," kata Satake kepada awak media



Segala bentuk penyalahgunaan pupuk bersubsidi mengakibatkan kerugian petani maupun kerugian negara."

KOMBESPOL SATAKE BAYU SETIANTO
Kabidhumas Polda Jateng

kemarin (1/10).

Dia melanjutkan, sopir truk tersebut mengaku telah diperintah seseorang berinisial C untuk mengirimkan muatan itu tanpa disertai dokumen sah. "Sopir juga mengaku pernah mengirim muatan serupa ke Getas dan Bangklean atas permintaan orang lain berinisial N," ungkapnya.

Truk beserta muatannya telah diamankan di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Kota Semarang. Sopir truk tersebut juga ditahan

untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Satake memastikan, pengungkapan upaya penyelewengan pupuk tersebut merupakan salah satu bentuk jaminan dan perlindungan kepada petani. Dia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi dan penggunaan pupuk subsidi.

"Segala bentuk upaya penyalahgunaan pupuk bersubsidi mengakibatkan kerugian petani maupun kerugian negara. Akan kami tindak tegas," ujarnya. **(tos/dri)**



ILEGAL: Tumpukan pupuk sebanyak 200 sak dalam truk yang telah diamankan di Mapolda Jateng kemarin (1/10).

Title	Tepung Porang, Kaya Manfaat dan Baik untuk Tubuh
Date	2 Oktober 2023
Media	Kompas
Page	9
Author	Deonista Arlinta



Kementerian Pertanian

Tepung Porang, Kaya Manfaat dan Baik untuk Tubuh

Umbi porang yang diolah menjadi tepung bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai jenis panganan olahan. Kandungan nutrisi porang cukup tinggi sehingga baik untuk kesehatan.

Deonista Arlinta

Umbi porang sebenarnya bukan tumbuhan baru di Indonesia. Tumbuhan dengan nama Latin *Amorphophallus muelleri* dari suku *Araceae* atau lili-lili ini tumbuh baik di Indonesia, terutama di kawasan hutan dengan naungan pohon berstruktur vegetasi alami yang seimbang.

Akan tetapi, proses pengolahan porang yang tidak mudah membuat pemanfaatannya tidak optimal. Agar bisa dikonsumsi, zat racun yang terkandung di dalam porang harus dihilangkan terlebih dahulu. Porang mengandung kristal kalsium oksalat yang dapat memberikan efek gatal pada kulit.

Euforia terkait umbi porang pernah terjadi saat Presiden Joko Widodo pada pertengahan 2021 menyatakan porang sebagai komoditas pertanian unggulan di masa depan. Porang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan potensi pasar yang besar (*Kompas*, 29/8/2021).

Sejak saat itu, petani-petani porang bermunculan. Ketersediaan porang pun cukup melimpah di Indonesia. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan permintaan pasar yang tinggi di dalam negeri. Sebagian besar permintaan bahan baku porang datang dari luar negeri.

Dalam rilis resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (29/9/2023), setidaknya 25 ton porang dalam bentuk serpih (*chips*) diekspor ke China. Selain China, negara pemasok utama ekspor porang adalah Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam.

Ketua Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sains Perguruan Tinggi (PUT-PT) Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia (P4I) Universitas Brawijaya,



Umbi Porang (*Amorphophallus muelleri* Blume)

Mengandung karbohidrat (dalam bentuk pati, serat, gula reduksi), lemak, protein, serta unsur mineral dan vitamin yang baik untuk tubuh.



Tepung porang

Mengandung glukoman tinggi yang kaya serat larut air sehingga bermanfaat bagi kesehatan, antara lain:

- Mengandung kadar glikemik rendah <55% yang cocok bagi penderita diabetes mellitus.
- Bebas gluten

Umbi porang tidak dapat dikonsumsi secara langsung karena mengandung kristal kalsium oksalat yang beracun. Diperlukan pengolahan khusus untuk menghilangkan kristal tersebut pada proses pembuatan tepung porang.

Manfaat glukoman

- Sumber serat pangan yang dapat membantu kelancaran proses saluran pencernaan.
- Dapat mengurangi risiko terkena sembelit dan kanker usus besar.
- Asupan makanan dengan kalori rendah dan memberikan rasa kenyang.
- Baik untuk mengontrol diabetes dan diet berat badan.

- Mengatasi kelebihan kolesterol melalui pengurangan penyerapan lemak ke dalam darah.
- Dapat mengurangi timbunan lemak di organ hati.
- Dapat dicampurkan pada berbagai makanan sehingga memberikan sensasi tekstur makanan yang lebih menarik.

Sumber: Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Porang (P4I-PT) Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia (P4I) Universitas Brawijaya Malang

INDRAJATI, SINDU SURATI

Sumber glukoman tertinggi saat ini ditemukan di Indonesia.

Glukoman merupakan polisakarida (jenis karbohidrat) yang terdiri dari ikatan α -glukosa dan monomer β -1,4- α -mannosa. Kandungan itu baik untuk program diet karena rendah kalori dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Glukoman dapat membantu menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, mengontrol kadar gula darah, dan mengontrol darah tinggi.

Selain mengandung glukoman yang tinggi, porang pun mengandung pati, protein, serta beragam vitamin dan mineral. Umbi porang yang berwarna oranye juga kaya akan karotenoid yang berfungsi sebagai antioksidan.

"Karotenoid ini menjadi kelebihan umbi porang dibandingkan sumber glukoman tinggi lainnya, seperti umbi konjac (*Amorphophallus konjac*) yang tumbuh di Jepang dan China," tutur Rodyati.

Tepung porang

Potensi besar umbi porang itu yang awalnya mendorong Simon meneliti porang lebih jauh. Penelitian terhadap porang sudah dilakukan sejak 2007. Saat itu, penelitian dilakukan untuk mengembangkan umbi porang menjadi bahan baku olahan lain.

Pengembangan pun akhirnya difokuskan untuk mengolah umbi porang menjadi bentuk tepung. Hal itu dilakukan karena tepung lebih mudah diolah menjadi campuran berbagai je-

nis pangan lain, seperti mi, bakso, dan sosis. Pangan olahan dengan bahan baku tepung porang dinilai lebih sehat dibandingkan dengan makanan yang menggunakan jenis tepung lainnya.

Tepung porang mengandung glukoman tinggi yang kaya serat larut air. Kadar glikemik pada tepung porang kurang dari 55 persen sehingga cocok bagi penderita diabetes mellitus. Selain itu, tepung porang juga bebas gluten.

Dalam proses pembuatan tepung porang, ada dua cara yang bisa dilakukan. Proses pertama dilakukan dengan sistem kering.

Secara teknis, proses dengan sistem kering dilakukan dengan memotong umbi porang menjadi bentuk tipis dan dilanjutkan dengan mengeringkan potongan tersebut sebelum akhirnya digiling menjadi tepung.

Sebelum dikeringkan, proses pemisahan kristal kalsium oksalat dilakukan terlebih dahulu.

Sementara proses kedua dilakukan dengan sistem basah. Cara ini dilakukan dengan memotong umbi porang menjadi bagian kecil. Setelah itu, umbi diparut dan dihaluskan. Lalu, umbi yang sudah dihaluskan diekstrak dengan alkohol untuk memisahkan fraksi berat dan fraksi ringan. Hasil endapan kemudian dikeringkan dan diolah menjadi tepung.

Proses pemisahan fraksi berat dan ringan tersebut sekaligus untuk memisahkan antara glukoman dan kalsium oksalat.

Glukoman dalam tepung porang termasuk ke dalam fraksi berat karena memiliki berat molekul yang lebih besar, sedangkan kristal kalsium oksalat termasuk ke dalam fraksi ringan karena memiliki berat yang lebih ringan.

Simon mengatakan, tepung porang dapat dimanfaatkan untuk membuat produk turunan porang lain, seperti bakso, sosis, mi kering, mi basah, es krim, jeli, dan daging iris porang.

Tepung porang juga sudah dimanfaatkan untuk membuat kue tradisional. Salah satu yang sudah dikembangkan ialah untuk membuat kue bantal yang menjadi makanan khas Nusa Tenggara Timur.

"Kue tradisional yang menggunakan tepung porang lebih kenyal dan memiliki daya simpan yang lebih lama. Namun, tepung porang tidak terlalu cocok digunakan untuk membuat panganan kering, seperti kerupuk atau biskuit, karena tekstur akhir yang dihasilkan menjadi keras," katanya.

Pengembangan

Porang masih punya potensi besar untuk dikembangkan. Pengembangan lain antara lain untuk membuat porang sebagai bahan baku pasta gigi. Porang bisa dikembangkan pula untuk suplemen pengontrol gula darah dan kolesterol. Sejumlah riset pada hewan uji telah membuktikan manfaat porang sebagai pengontrol gula darah dan kolesterol.

Pengembangan lain dapat dilakukan pula dengan menghasilkan tepung porang dengan ukuran partikel yang sesuai dengan permintaan perusahaan.

Tepung porang yang dikembangkan oleh Simon dan timnya saat ini berukuran 80 mesh. Sementara permintaan industri, termasuk untuk impor, dibutuhkan ukuran 120 mesh. "Diharapkan keberlanjutan pengembangan dari penelitian porang bisa dipastikan. Di samping itu, butuh dorongan agar pasar dalam negeri terhadap kebutuhan porang juga semakin besar," ujar Simon.

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	Aturan Keamanan Pangan Masuk Tahap Harmonisasi	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Ratih Waseso Aji	

KEBIJAKAN PANGAN

Aturan Keamanan Pangan Masuk Tahap Harmonisasi

JAKARTA. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan Atas PP No 86/2019 tentang Keamanan Pangan masuk dalam tahap harmonisasi lanjutan.

Harmonisasi lanjutan tersebut membahas lebih dalam tentang masukan kementerian/lembaga (K/L) lainnya agar sistem pengawasan keamanan pangan dapat dijalankan dengan baik oleh masing-masing instansi pemerintah.

"Rapat harmonisasi lanjutan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa RPP Per-

ubahan Atas PP 86/2019 dapat mengakomodasi kepentingan *stakeholder* terkait," kata Yusra Egayanti, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), dalam keterangan resmi, Minggu (1/10).

Rapat harmonisasi lanjutan yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM mencapai kesepakatan atas masukan-masukan dari K/L lainnya.

Kemenkumham masih memberikan kesempatan kepada setiap K/L untuk mem-

berikan masukannya terhadap RPP Keamanan Pangan.

Selain itu, disepakati pula apabila tidak terdapat masukan lainnya, maka penyusunan RPP perubahan ini akan dilanjutkan dengan finalisasi *drafting* regulasi.

Harapannya, draf regulasi tersebut dapat disampaikan kepada Sekretariat Negara pada Oktober tahun ini untuk permohonan pengesahan.

Yusra berharap bahwa dengan penyusunan RPP Keamanan Pangan ini, sistem pengawasan keamanan pa-

ngan di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

"Kami berharap bahwa RPP Perubahan Atas PP 86/2019 ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga dapat mewujudkan keamanan pangan yang terjamin bagi seluruh masyarakat Indonesia," imbuh Yusra.

Sejatinya, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar, karenanya ketersediaan pangan dan produk pangan

yang terjangkau semua pihak merupakan hal yang penting. Namun demikian, produsen juga harus dapat menghasilkan produk pangan yang tidak hanya memenuhi gizi dan nutrisi, tapi juga harus memenuhi mutu dan higienitas sanitasi makanan, sehingga aman untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu, penting bagi produsen untuk memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan sesuai perundang-undangan.

Ratih Waseso Aji

Title	Gejolak Harga Pangan & Komoditas Kerek Inflasi	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	2	
Author	Bidara Deo Pink	

Gejolak Harga Pangan & Komoditas Kerek Inflasi

El Nino dan kenaikan harga komoditas berpotensi mendorong inflasi di akhir tahun 2023

Bidara Deo Pink

JAKARTA. Ancaman inflasi masih mengintai Indonesia memasuki kuartal keempat tahun ini. Selain krisis pangan, harga barang berpotensi naik lantaran harga komoditas energi kembali menanjak. Sejumlah ekonomi memberikan catatan, fenomena El Nino dan kenaikan harga komoditas bisa memicu inflasi di pengujung tahun 2023. Sebagai gambaran, sejumlah ekonom juga melihat selama bulan September 2023 Indonesia akan mencatatkan inflasi, dari posisi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,02% (*lihat tabel*). Namun secara tahunan atau *year-on-year* (yoy), inflasi

nasional berpotensi turun. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, memproyeksikan inflasi tahunan pada September tahun ini berada di level 2,78% yoy. Angka ini menurun dibandingkan inflasi Agustus 2023 yang sebesar 3,27% yoy. Pun lebih rendah dibandingkan inflasi September 2022 yang mencapai 5,95% yoy. "Capaian inflasi September 2023 karena ada faktor basis tinggi dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun lalu," terang dia kepada, kemarin. Ekonom Bank Danamon Irmam Faiz menghitung, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada bulan September 2023 sebesar 0,17% *month on month* (mom).

Dia menyiratkan, salah satu penyebab inflasi pada bulan September adalah kenaikan bahan bakar nonsubsidi. Bukan karena harga pangan. "Harga pangan secara bulanan justru diyakini menurun, terutama untuk harga beras, harga bawang merah, cabai, dan daging ayam," terang Faiz, Minggu (1/10). Pada kuartal IV-2023, Faiz memperkirakan ada potensi untuk kenaikan inflasi.

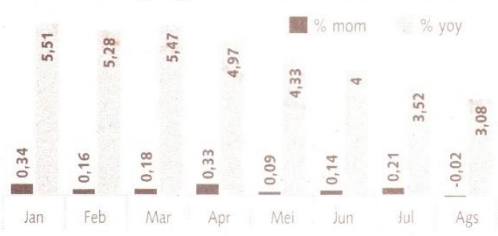
Proyeksi akhir tahun

Banjaran juga mewanti-wanti soal kenaikan harga pangan ke depan. Menurut dia, mengacu data harga pangan Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya kenaikan harga beras yang cukup signifikan sepanjang bulan lalu. Ini dipicu fenomena kekeringan atau El Nino. Bahkan, El Nino berpotensi berlanjut hingga kuartal I-2024. "Sehingga tekanan dari harga bergejolak kemungkinan masih besar dan berlangsung hingga tahun depan," terang Banjaran. Di sisi lain, harga minyak mentah juga masih melanjutkan tren kena-

ikan sejak Juli 2023. Kondisi ini membuat badan usaha kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi untuk mengimbangi kenaikan harga minyak mentah. Nah, hal ini berpotensi mengerek inflasi dari sisi inflasi harga bergejolak pada September 2023. Namun, Banjaran yakin dampaknya masih relatif kecil, karena sensitivitas inflasi Indonesia terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi lebih rendah dibandingkan BBM subsidi. Pada akhir tahun 2023, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkira-

kan inflasi akan bergerak di kisaran 2,60% yoy atau berada dalam rentang BI yang sebesar 2% yoy plus minus 1%. Meski demikian, Josua mewanti-wanti agar Indonesia mewaspadai risiko yang bisa mendorong inflasi. "Seperti adanya El Nino dan peristiwa cuaca ekstrem yang dapat memberikan tekanan pada inflasi pangan," ucap dia. Segendang sepenarian, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual juga mengingatkan, memasuki kuartal IV-2023 masih ada hal yang mungkin bisa mengungkit tingkat inflasi. Seperti pandangan BSI dan Bank Permata, BCA juga melihat eskalasi inflasi akan datang dari tren kenaikan harga komoditas, terutama harga minyak dan fenomena kekeringan panjang yang mungkin mengerek inflasi pangan. Adapun Bank Danamon meyakini inflasi pada akhir 2023 tetap berada di kisaran sasaran BI yang sebesar 2%-4% yoy. "Dari perhitungan kami, inflasi pada akhir 2023, paling tinggi berada di kisaran 3,0% yoy," kata Faiz.

Perkembangan Inflasi RI Tahun 2023



Inflasi Bulanan Berdasarkan Komponennya Tahun 2023

Bulan	Inti	Harga yang Diatur Pemerintah	Barang Bergejolak
Jan	0,33	-0,55	1,40
Feb	0,13	0,14	0,28
Mar	0,16	0,12	0,29
Apr	0,25	0,69	0,29
Mei	0,06	-0,25	0,49
Jun	0,12	-0,02	0,44
Jul	0,13	0,44	0,17
Agu	0,13	-0,02	-0,51

Sumber: BPS

Title	Harga Gula Bertahan Tinggi Hingga 2024	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Ratih Waseso Aji	

■ PANGAN

Harga Gula Bertahan Tinggi Hingga 2024

JAKARTA. Selain harga beras yang masih mahal, harga komoditas pangan lainnya seperti gula diperkirakan bakal bertahan tinggi hingga tahun depan. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan India yang menyetop ekspor gula mulai Oktober tahun ini.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman memperkirakan, harga gula kristal rafinasi (GKR) bisa bertahan tinggi hingga tahun

harga gula di pasar. Meski demikian, Adhi mengungkapkan bahwa stok gula industri secara nasional masih mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun 2023. "Namun memang ada industri agri yang sudah habis stok," tutur dia.

Kenaikan harga GKR bakal berpengaruh pada harga produk jadi di sektor makanan dan minuman berpemanis. Namun dengan kondisi pasar yang sepi, beberapa produsen makanan dan minuman ragu untuk menaikkan harga jual produk mereka. Adapun langkah yang dilakukan produsen ialah dengan mengurangi margin hingga mencari alternatif bahan baku.

Gapmmi melaporkan, kenaikan harga gula juga terjadi di pasar internasional. "Posisi sekarang harga *raw sugar* di pasar internasional sudah di level US\$ 26 per *pound*. Bahkan harga gula sempat mencapai level tertinggi hingga di level US\$ 29," sebut Adhi.

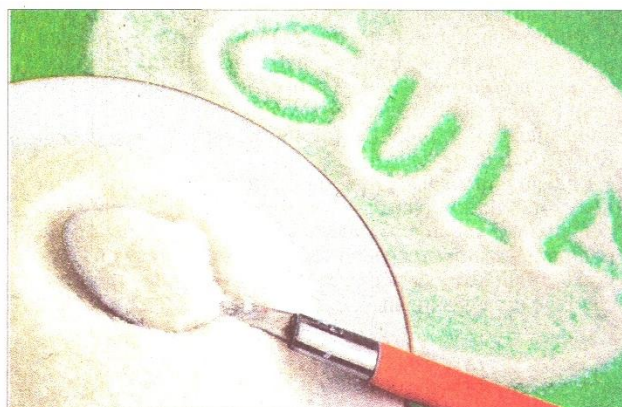
Meski demikian, harga *raw sugar* beberapa waktu lalu juga sempat turun ke level US\$ 23-US\$ 24 per *pound*. Sama seperti pasar lokal, kondisi harga tersebut diproyeksikan bertahan tinggi sampai tahun depan. Adhi berharap, pemerintah tidak membuat kebijakan yang akan menambah beban industri di saat harga gula tinggi.

Ratih Waseso Aji

Kebijakan India menyetop ekspor gula bisa berdampak pada kenaikan harga.

depan. Di pasar dalam negeri, harga GKR sudah di atas Rp 14.000 per kilogram. "Lokal GKR sudah di atas Rp 14.000. Perkiraan saya harga akan bertahan sampai tahun depan," kata dia kepada KONTAN, Minggu (1/10).

Ihwal India yang berencana menghentikan ekspor gula pada Oktober ini, Adhi bilang, Indonesia sebenarnya tidak banyak mendatangkan gula dari negara tersebut. Cuma, rencana India tentunya akan memantik spekulasi kenaikan



KONTAN/Baihaki

BIRO

Diperkirakan harga gula kristal rafinasi (GKR) bisa bertahan tinggi hingga tahun depan.

BLIK

Title	Kemtan di Tengah Krisis Pangan & Dugaan Korupsi	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Lailatul Anisah	

Kemtan di Tengah Krisis Pangan & Dugaan Korupsi

Namun kementerian Pertanian mengklaim program *food estate* mulai membuahkan hasil

Lailatul Anisah

JAKARTA. Kementerian Pertanian mendapatkan pukulan ganda. Di tengah ancaman krisis pangan yang semakin nyata, Menteri Syahrul Yasin Limpo kini berada di pusaran perkara dugaan rasuah yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemtan dinilai gagal menjalankan sejumlah program kerja untuk mengamankan Indonesia dari ancaman krisis pangan dan menekan laju impor bahan pangan.

Program-program kerja Kemtan dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap para petani, stabilitas pasar, hingga data stok pangan yang berbeda. Pekerjaan rumah (PR) besar masih menumpuk di Kemtan. Sebut saja kemelut pasokan pupuk, luas area pertanian yang menyusut, hingga problem klasik

dalam tata niaga ayam, sapi dan bawang.

Untuk pupuk, misalnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan dalam kebijakan program pupuk bersubsidi. Seperti tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat tujuan, kriteria petani penerima, pendataan yang tak kunjung menghadirkan data akurat, permasalahan penyaluran yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kekurangan hingga langkah pasokan pupuk subsidi.

Tak pelak, polemik pupuk ini berdampak pada anjloknya produksi beras nasional. Pasalnya, banyak petani gagal panen akibat kesulitan mendapatkan pupuk.

Di sisi lain, program lumbung pangan atau *food estate* yang menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dan digadang-gadang mampu memperkuat

dan menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, nyatanya masih jauh panggang dari api.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto me-

Program food estate dinilai gagal karena tak memenuhi aspek sosial budaya.

nuding proyek *food estate* yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian berpendapat, kegagalan *food estate* terjadi lantaran beberapa hal. Pertama, *food estate* tidak

memenuhi aspek agroklimatologi dan sosial budaya.

Kedua, sumber daya manusia (SDM) terbatas atau petani dengan keahlian yang dibutuhkan di program *food estate* sangat minim, sehingga pemerintah harus mendatangkan petani dari Jawa.

"Kemudian ini memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat petani pendatang dan petani asli daerah setempat," terang dia kepada KONTAN, Minggu (1/10).

Eliza menilai, pengembangan *food estate* terlalu fokus dengan proyek komoditas strategis berskala besar. Padahal pengembangan pangan lokal dan hilirisasi pangan lokal lebih penting untuk diversifikasi pangan. "Semestinya kita memulai diversifikasi ke pangan lokal," jelas dia.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kemtan, Kuntoro Boga menampik jika program *food estate* gagal. Ia

menyodorkan bukti beberapa program *food estate* sudah membuahkan hasil.

Sebagai contoh, upaya intensifikasi di Kalimantan Tengah berhasil meningkatkan produktivitas di kawasan Pulau Pisau dari tahun ke tahun. Dari awal dimulai pada tahun 2020 dengan hasil rata-rata 2,5 ton per hektare Gabah Kering Panen (GKP), meningkat menjadi 3,5 GKP ton per ha di tahun 2021 dan meningkat lagi mencapai 5,5 ton per ha pada tahun 2022.

Lokasi lain di Sumba Tengah, menurut Kuntoro, juga diklaim mampu mengurangi angka kemiskinan di kawasan *food estate* dan sekitarnya. "Petani Wonosobo pun merasakan manfaatnya dengan indikator terlihat produktivitas panen meningkat, jaminan pemasaran komoditas serta peningkatan pendapatan petani di kawasan *food estate*," kata dia.

Title	Produksi CPO Terancam Melandai 8%-12%	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	12	
Author	Sabrina Rhamadanty	

■ PERKEBUNAN

Produksi CPO Terancam Melandai 8%-12%

JAKARTA. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia memprediksi penurunan produksi CPO (*crude palm oil*) atau minyak sawit sebesar 8%-12% pada tahun 2023.

"Penurunan produksi paling banyak disumbang oleh perkebunan kelapa sawit rakyat," ungkap Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung kepada KONTAN, Minggu (1/10).

Gulat menyebutkan, ada beberapa hal yang mengganggu dan mengancam produksi CPO dalam negeri, khususnya memasuki kuartal ke-3 tahun 2023. "Aspek agronomis (ilmu untuk memaksimalkan produksi) yang menurun, terkhusus pemupukan yang merupa-

kan faktor utama dalam produksi," ungkap Gulat.

Tak hanya itu, adanya El Nino juga ikut mempengaruhi produksi karena kekurangan air. Kondisi ini membuat serba salah pada petani. Jika kelapa sawit dipupuk, tanaman sawit bisa stres, karena kekeurangan di lahan. Namun jika tidak dipupuk, produktivitas tanaman tidak normal hingga 8-12 bulan kedepan.

Gulat menyebut, tanaman sawit memang tanaman C4 atau tanaman yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan panas dan kering, yang justru berproduksi optimum jika dalam kondisi penyinaran/panas lebih panjang. Namun jika panas berkepanjangan justru berefek negatif.

"Faktor tadi (menurunnya pemupukan dan perawatan kebun), juga dimulai dari NTP (nilai tukar petani) yang menurun akibat tidak kunjung bergairahnya harga tandan

kata Gulat.

Harga yang tidak bergairah itu membuat petani memutuskan untuk mengurangi atau bahkan tidak memupuk sama sekali. "Kontribusi CPO yang berasal dari TBS petani memang hanya 28%-30%, meskipun secara luasan mencapai 42% dari total perkebunan sawit Indonesia. Dengan kondisi tadi, diperkirakan tahun depan produktivitas TBS dan CPO pekebun akan turun," ungkapnya.

Merujuk kondisi inilah, Gulat berasumsi, kontribusi dari produksi CPO dari petani kelapa sawit akan turun dari 28%-30% menjadi kisaran 24% atau 26% tahun ini.

Banyak petani mengurangi pupuk bahkan tidak memupuk kebun sawitnya.

buah segar (TBS) yang sekarang berkisar antara Rp 1.800-Rp 2.400 per kilogram (kg), sementara harga pokok produksi (HPP) sudah mencapai Rp 1.850-Rp2.150 per kg TBS,"

Sabrina Rhamadanty

Title	Pukulan Bertubi-Tubi Harga Beras Hingga BBM	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	1	
Author	Siti Masitoh, Yuwono Triatmodjo	

Pukulan Bertubi-Tubi Harga Beras Hingga BBM

Menakar lonjakan harga minyak, pangan dan pelemahan rupiah terhadap ekonomi nasional

Siti Masitoh,
Yuwono Triatmodjo

JAKARTA. Tekanan dan risiko ekonomi dalam negeri datang bertubi-tubi. Belum habis ditekan efek kenaikan harga beras dan pelemahan rupiah, kini harga minyak mentah di pasar dunia melesat lagi, sehingga harga bahan bakar minyak (BBM) bisa terkerek lagi.

Pada perdagangan Jumat (29/9), harga minyak jenis WTI untuk kontrak November 2023 di level US\$ 90,97 per barel. Bahkan dua hari sebelumnya sempat menyentuh posisi tertinggi dalam setahun terakhir, yakni US\$ 93,68 per barel (*lihat tabel*).

Ke depan, harga minyak dunia berpeluang naik terus akibat gangguan geopolitik maupun hambatan produksi. "Skenario terburuk, harga minyak akan sampai US\$ 150 per barel jika Rusia benar-benar menghentikan pasokan BBM ke Eropa," kata Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, kemarin.

Kenaikan harga minyak mentah berarti konsumen harus menanggung mahalnya harga BBM. Yang jelas, Pertamina

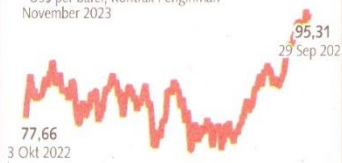
Harga Minyak WTI di Bursa New York*

* US\$ per barel; Kontrak Pengiriman November 2023



Harga Minyak Brent di Bursa Komoditas Eropa*

* US\$ per barel; Kontrak Pengiriman November 2023



Rerata Harga Beras Kualitas Medium II (Rp per kg)

Semua Provinsi



Sumber: hargapangan.id

menaikkan harga Pertamina series mulai 1 Oktober 2023. Harga Pertamina 92, misalnya, naik 1% dari Rp 13.850 per liter menjadi Rp 14.000 per liter.

Tekanan harga energi ini memperberat impitan biaya hidup konsumen yang belum lepas dari tekanan kenaikan harga beras maupun pelemahan rupiah. Pada 22 September lalu, harga beras kualitas medium II di level Rp 14.150 per kg, lebih tinggi dari awal tahun 2023 yang sebesar Rp 12.450 per kg. Sementara dalam enam bulan terakhir, rupiah melorot 3% menjadi Rp 15.474 per dolar AS.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-

Indeks Harga Pangan FAO

Tahun	Bulan	Daging	Gandum	Gula
2022	Agus	121,1	145,6	110,5
	Sep	120,3	147,9	109,7
	Okt	116,8	152,3	108,6
	Nov	114,6	150,1	114,4
	Des	112,4	147,3	117,2
2023	Jan	111,1	147,5	116,8
	Feb	113,3	146,7	125,2
	Mar	114,7	138,6	127,0
	Apr	116,8	136,1	149,4
	Mei	118,1	129,3	157,2
	Jun	119,0	126,6	152,2
	Jul	118,2	125,9	146,3
2023	Agus	114,6	125,0	148,2

Sumber: Food and Agriculture Organization (FAO)

wanti efek kenaikan harga minyak terhadap APBN. Jika harga minyak melejit, anggaran subsidi yang harus digelon-

torkan pemerintah semakin besar.

Adapun kenaikan harga beras bisa berefek ke inflasi. Setiap kenaikan 1% harga beras, kata Josua, akan menyumbang inflasi 0,03%-0,04%. Dus, "Pemerintah perlu konsisten menjaga daya beli masyarakat dan memitigasi potensi kenaikan inflasi sehingga konsumsi tetap solid," kata dia, kemarin.

Lonjakan harga minyak juga bisa menjebol kuota BBM subsidi lantaran harga BBM nonsubsidi terus merangkak naik. Ada pergeseran konsumsi BBM.

Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya menyebutkan, untuk menjaga rupiah tetap

aman, nilai ekspor harus tetap terjaga lebih tinggi dibanding impor. Selain itu, bisa juga mendorong *capital inflow* jika suku bunga Indonesia lebih tinggi dari bunga global.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo tak menampik dinamika harga minyak dan tekanan kurs berdampak pada APBN. Namun, "Sejauh ini tetap terkendali," kata dia.

Pemerintah akan mengoptimalkan APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi daya beli masyarakat. "Sampai Agustus 2023, APBN masih surplus Rp 147 triliun," kata Wahyu.

Lihat halaman 2

Title	Kemarau masih Panjang, Harga Beras Tetap Tinggi	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	13	
Author	LD/MY/RR/PO/BB/DW/DY/JS/RS/RR/LD/AN/FL/RF/N-2	

Kemarau masih Panjang, Harga Beras Tetap Tinggi

HARGA beras di sejumlah daerah di Tanah Air diberitakan masih tinggi, bahkan meski pemerintah gencar melakukan operasi pasar. Untuk beras medium, misalnya, umumnya dijual Rp13 ribu per kilogram.

Dinas Pertanian (Din-pertan) Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng), tidak menampik bahwa masa tanam bakal mundur sehingga secara otomatis paceklik kian panjang karena masa panen juga mundur. “Sebenarnya, saya berharap musim tanam pertama dapat berlangsung pada Oktober-November. Tetapi karena masalah air irigasi, berdampak pada mundurnya musim tanam pertama,” kata Kepala Din-pertan Purbalingga Muko-dam, kemarin.

Hal yang sama terjadi di Bengkulu. Warga mengeluhkan harga beras di pasar tradisional makin tinggi. Kondisi itu membuat warga terpaksa membeli beras dengan kualitas rendah agar dapat mencukupi kebutuhan yang lain.

Di Nusa Tenggara Timur, harga beras di tingkat petani bahkan telah mencapai Rp12.500 per kilogram (kg) dari harga normal Rp9.000-Rp10.000 per kg. Kenaikan harga beras dipicu kekeringan yang membuat petani setempat tidak menanam pada musim tanam kedua tahun ini serta adanya rehabilitasi saluran irigasi.

Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Profesor Ahmad Yunani mengimbau Pemprov Kalsel untuk mulai mengembangkan diversifikasi bahan pangan selain beras.

“Tingginya harga beras terutama beras lokal karena mulai langka di pasaran, akibat gagal panen, kekeringan, hama, dan petani kekurangan modal untuk bertani. Sementara itu, permintaan tinggi karena beras lokal cocok dengan lidah orang Banjar dan dikonsumsi mayoritas masyarakat Kalsel,” tuturnya.

Bukan cuma kegagalan panen, akibat kemarau masyarakat juga kekurangan air bersih. Di Klaten, Jawa Tengah, sebanyak 4.099 kepala keluarga saat ini bahkan menggantungkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dari bantuan pemerintah dan stakeholder.

Di Kabupaten Konawe, masyarakat Bajo hanya bisa mengandalkan air dari sumur bor yang berminyak. Pasi Ops Batalyon C Pelopor Brimob Polda Sultra Ipda Muhammad Noor mengungkapkan penyaluran air bersih dilakukan guna mengantisipasi warga kekurangan air di musim kemarau. Atas arahan Dansat Brimob Polda Sultra, pihaknya mendistribusikan sekitar 5.500 liter air. (LD/MY/RR/PO/BB/DW/DY/JS/RS/RR/LD/AN/FL/RF/N-2)

Title	Mitigasi Puncak Bencana Kekeringan	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	1	
Author	Media Indonesia	

EDITORIAL

Mitigasi Puncak Bencana Kekeringan



BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan kabar gembira bahwa musim hujan yang baru saja berlalu. Kabar gembiranya, bulan ini sebagian wilayah di Tanah Air akan mulai memasuki awal musim penghujan. Siraman air hujan sudah sangat dinantikan setelah berbulan-bulan suhu begitu terik. Selama itu sumber-sumber air dan lahan tanaman pangan mengering. Kebakaran hutan (karhutla) juga meluas. Di perkotaan, kekeringan tidak hanya mengancam pasokan air bersih, tetapi juga memperparah dampak polusi.

Kabar buruknya, musim hujan yang dimulai Oktober diperkirakan baru dialami segelintir wilayah, tercatat hanya 14,39% luasan zona musim. Sebagian besar wilayah sisanya memasuki musim hujan paling cepat pada November.

Dengan prakiraan tersebut, bila tidak meleset, banyak wilayah yang harus menanggung dampak kekeringan yang memuncak bulan ini. Wilayah tersebut, menurut BMKG, meliputi Sumatra bagian tengah hingga selatan, Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Kemudian, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua bagian selatan.

Ancaman suhu panas juga menguat. Dalam pekan terakhir September, suhu terpanas di wilayah Indonesia menembus angka 37 derajat celsius. Hari-hari ke depan, suhu terpanas diperkirakan akan mencapai 42 derajat celsius, tepatnya di Kota Surabaya.

Ancaman gangguan kesehatan dan penyakit yang berhubungan dengan dampak polusi dan sengatan suhu panas semakin besar. Harga bahan pangan yang sudah naik bakal semakin mahal seiring dengan kian meluasnya lahan tanaman pangan yang mengering.

Pasokan air bersih akan semakin tersendat. Menurut pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang periode 14-21 September 2023 saja, tidak kurang dari 166.415 penduduk mengalami krisis air bersih.

Di kawasan hutan, titik-titik api makin mudah muncul dan menjalar dengan cepat. Asap karhutla merambah wilayah yang lebih luas. Saat ini pun Provinsi Jambi tengah berkuat dengan bencana asap hingga terpaksa meliburkan sekolah-sekolah.

Pendeknya, situasi kekeringan akan mencapai titik kritis bulan ini. Langkah-langkah mitigasi yang sudah dijalankan harus diperkuat dan ditingkatkan sesuai dengan karakter permasalahan di tiap wilayah.

Pemerintah pusat dan daerah mesti bergerak seirama mengatasi dampak kekeringan. Operasi-operasi pasar bahan pangan digelar secara terkoordinasi dan efektif untuk memastikan konsumen berproduksi rendah membayar sesuai dengan harga operasi pasar.

Itu berarti tidak semata menyerahkan kepada pedagang-pedagang besar. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Perum Bulog perlu menggerakkan tim-tim operasi pasar langsung menjangkau konsumen. Tidak ada gunanya impor beras secara masif bila gagal menekan harga di pasar. Bikin rakyat bertanya-tanya untuk apa sebenarnya impor itu.

Pengaliran mobil-mobil tangki air juga harus sampai ke pelosok permukiman penduduk yang mengalami krisis air bersih. Jangan sampai ada yang terlewat.

Jurus-jurus jitu mitigasi puncak kekeringan tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Sayangnya, pemerintah mengalihkan anggaran jorjoran infrastruktur untuk itu.

Jangan sekali-kali menganggap enteng. Itu bukan sekadar upaya mencegah gejolak sosial menjelang puncak tahun politik. Tanggung jawab pemerintah menjalankan tugas negara melindungi segenap rakyat Indonesia kapan pun dan di mana pun, tidak terkecuali dari bahaya bencana kekeringan.

Title	DKPP Ketersediaan Pangan Aman	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Kabar Banten	
Page	3	
Author	H-48	



KEPALA DKPP Kabupaten Serang Suhardjo (kedua kiri) saat panen padi di Kecamatan Ciruas belum lama ini.*

DINDIN HASANUDIN*/KB

11.999 Ha Sawah Masih Panen di Musim Kemarau

DKPP: Ketersediaan Pangan Aman

SERANG, (KB).- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang menyebutkan, sampai saat ini masih ada 11.999 hektare sawah di wilayahnya yang panen padi. Hal tersebut menurut DKPP membuat ketersediaan pangan di Kabupaten Serang masih akan aman walau dilanda kemarau panjang.

Kepala DKPP Kabupaten Serang Suhardjo mengatakan, walau banyak lokasi padi puso, namun sampai September masih ada 11.999 hektare sawah yang panen.

Dengan demikian, dari target 535 ribu ton padi pada 2023, hingga September sudah tercapai 67 persen atau 369,5 ribu ton.

Selain itu, kata dia, untuk memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Serang, Pemkab Serang juga mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan gerakan nasional penanaman padi.

Hal itu dilakukan dalam rangka lumbung pangan nasional untuk cadangan pangan dan stabilitas ketahanan pangan nasional.

Ia mengungkapkan, Kabupaten Serang mendapat 16 ribu hektare. 1.000 hektare ditanam pada Agustus, 5 ribu hektare pada September dan 10 ribu hektare ditanam pada

Oktober. "Itu optimistis kita bisa serap, kita juga sudah seleksi lahan yang masih ada sumber air. Saat El Nino sumber air agak susah tapi kita masih seleksi areal yang masih ada sumber air tapi perlu pompanisasi kita berikan pompanisasi," ujarnya kepada **Kabar Banten**, Ahad (1/10/2023).

Sedangkan bagi yang sama sekali tidak ada sumber air, kata dia, pihaknya mengupayakan sumur dalam. Tahun ini ada bantuan sumur dalam satu unit di Cikande, dan di Tanara ada sumur pantek dua titik bersumber dari APBD Provinsi Banten. "Itu untukantisipasi agar warga bisa tanam padi dipercepat dalam gerakan tanam nasional," tuturnya.

Sampai saat ini, kata dia,

di Kabupaten Serang ada 24 kecamatan yang terdampak kekeringan. Total kekeringan hingga 22 September sudah mencapai 1.564 hektare. Terdiri dari kategori ringan 667 hektare, sedang 247 hektare, berat 224 hektare dan puso 355 hektare. "Tapi dari jumlah itu yang berhasil dipulihkan 98 hektare, 25 hektare

berhasil dipanen, dari yang puso itu. Itu di Carenang, Lebak Wangi, Cikeusal dan Padarincang," katanya.

Suhardjo mengatakan, lahan tersebut berhasil dipulihkan karena di sana ada sumber air dan hanya butuh pompanisasi. Oleh karena itu, diberikan pinjaman pompanisasi. **(H-48)*****

Title	DPKP: Ada 4.747 Hektare Lahan Masih Bisa Ditanami Padi	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Tangsel Pos	
Page	5	
Author	Net/cmb	

DPKP: Ada 4.747 Hektare Lahan Masih Bisa Ditanami Padi

TANGERANG-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang menyatakan pihaknya terus menangani dampak kekeringan lahan pertanian yang melanda sebagian wilayahnya. Meski demikian, masih terdapat 4.747 hektare lahan di Kabupaten Tangerang yang dapat ditanami padi.

"Total area yang terkena dampak kekeringan ini meliputi 24 Kecamatan. Dengan terjadinya fenomena El-Nino dan kekeringan itu, tentunya akan berpengaruh terhadap hasil produksi dan naiknya harga gabah. Kami akan terus berkoordinasi dengan Provinsi Banten dan Kementerian untuk menangani permasalahan tersebut," kata Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, Sabtu (30/9).

Sejumlah upaya yang dilakukan DPKP

adalah monitoring kondisi lahan yang terdampak. Selain itu, DPKP juga mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air seperti pompa dan sumur kepada Kementerian Pertanian.

"Yang pasti untuk monitoring (lahan pertanian) kami terus lakukan. Untuk langkah yang sedang kita lakukan sekarang adalah mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air, seperti pompa air dan sumur pantek," ucapnya.

Berdasarkan data dari DPKP Kabupaten Tangerang per tanggal 19 September tahun 2023, sebanyak 1.276 hektare lahan pertanian mengalami dampak kekeringan. Dengan rincian sebanyak 590 hektare masuk ke kategori kekeringan ringan, 335 hektare kekeringan sedang, 207 hektare kekeringan berat dan 144 hektare mengalami puso (gagal panen).

Guna mengatasi masalah kekeringan, pihaknya mengajukan beberapa program bantuan sarana pendukung penyediaan air dari pemerintah pusat. Misalnya, pengajuan sumur di 148 titik, pompa air enam inci 15 unit, pompa air empat inci 31 unit, pompa air tiga inci 12 unit.

Selanjutnya, pihaknya mengajukan sokongan berupa benih padi untuk tanaman seluas 4.747 hektare di lahan terdampak kekeringan tersebut.

"Sebelumnya kami pun telah membagikan bantuan benih yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Kementerian Pertanian sebanyak 25 ton di 22 desa. Kita juga telah membagikan lima unit pompa air yang bersumber dari dana kementerian," bebernya. (net/cmb)



Title	Dukung Ketahanan Pangan, Petani Dapat Bantuan Saprodi dan Alsintan	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Karawang Ekspres Bekasi	
Page	4	
Author	Bbs/rie	

Dukung Ketahanan Pangan, Petani Dapat Bantuan Saprodi dan Alsintan

DALAM rangka mendukung program ketahanan pangan dan membantu petani memaksimalkan hasil pertaniannya. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika membagikan sarana produksi pertanian (Saprodi) dan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk para petani dan kelompok tani di wilayah Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.

Penyerahan bantuan untuk kelompok tani di 16 desa pada wilayah Kecamatan Plered itu dipusatkan di Kantor Desa Cibogohilir. Tampak hadir juga Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan

dan jajaran serta perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) setempat.

"Bantuan Alsintan dan Saprodi yang diserahkan ke kelompok tani adalah untuk membantu para petani agar dapat memproduksi hasil pertaniannya secara maksimal demi mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Purwakarta," kata Ambu Anne, kepada awak media.

Pemkab Purwakarta, lanjut Ambu Anne, berupaya konsisten untuk menjadikan petani di Purwakarta menjadi produsen baik untuk diri sendiri maupun untuk mencukupi kebutuhan pasar. "Oleh karena itu,

para petani nantinya harus komitmen untuk dapat memproduksi hasil tani terus menerus, jangan sampai selesai program selesai juga memproduksi lahan pertaniannya," ujarnya.

Ambu Anne juga mengatakan, Saprodi atau sarana produksi pertanian merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama untuk membantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.

"Saprodi berperan penting di dalam usaha mencapai produksi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang menjadi permasalahan di

Purwakarta sekarang ini belum tersentralnya pusat penjualan gabah hasil panen, tidak ada satupun di kecamatan di Kabupaten Purwakarta yang bisa yang ditetapkan sebagai tempat penyimpanan atau gudang dan pengemasan beras. Karena para tengkulak di setiap desa sudah memiliki kerjasama dengan para vendor di luar Purwakarta," kata Ambu Anne.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 20 tahun terakhir ini, lahan pertanian di Kabupaten Purwakarta banyak yang beralih fungsi. Oleh karena itu, ia bersama DPRD mengeluarkan Perda yang mengunci lahan per-

tanian. "Pemda Purwakarta terus berkomitmen untuk untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri, meskipun mengorbankan tawaran investasi ke Purwakarta," tuturnya.

Kata dia, upaya pemerintah kepada para petani tidak sampai disitu saja, guna menjaga petani mengalami gagal panen pemerintah mengeluarkan asuransi pertanian seluas lima ribu hektar.

Kalau lahan yang lima ribu hektar ini mengalami gagal panen atau fuso maka petani akan mendapatkan asuransi tersebut. Selain itu untuk tahun sekarang sebagai upaya

untuk meningkatkan hasil pertanian pemerintah akan membangun 70 titik irigasi tersier yang diperbaiki dan dibangun," ujarnya.

Diketahui, dalam agenda tersebut juga dilakukan sosialisasi pertanian sebagai bentuk kolaborasi antara DPC HKTI Kabupaten Purwakarta dan Dispangtan Kabupaten Purwakarta. Hadir juga Ketua DPC HKTI Kabupaten Purwakarta Dasep Sampul Akbar (Kang Abay).

Kepala Dispangtan Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan dalam keterangannya mengatakan, kegiatan sosialisasi ini memba-

has dan mensosialisasikan mekanisme bantuan Saprodi dan Alsintan yang disediakan oleh pemerintah.

"Kecamatan Plered merupakan kecamatan terbesar yang menghasilkan lumbung padi. Maka dari itu, peran Pemda dan HKTI sangat diperlukan. Ke depan kita akan terus bersinergi," kata Midan.

Kadispangtan Purwakarta juga mengapresiasi jajaran HKTI Kabupaten Purwakarta, khususnya HKTI Kecamatan Plered yang meskipun masih tergolong baru, namun dapat mengkomodir dan mengkoordinasikan para petani di wilayah tersebut. (bbs/rie)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

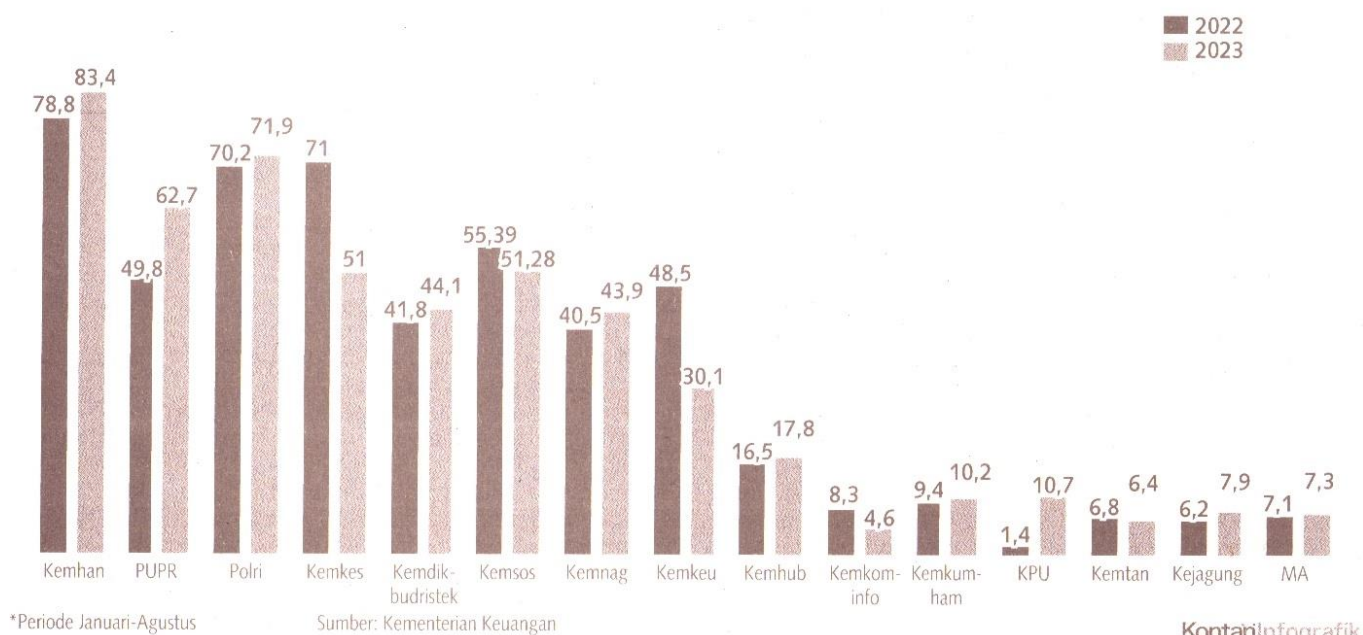
Title	Realisasi Belanja Lima Kementerian Melambat	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	2	
Author	Kontan/Adinda Ade Mustam	

Realisasi Belanja Lima Kementerian Melambat

Realisasi belanja pemerintah pusat masih perlu dipercepat di kuartal ketiga hingga akhir tahun nanti. Sebab, masih ada kementerian dan lembaga (K/L) yang realisasi anggarannya malah lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), dari 15 K/L dengan pagu anggaran terbesar, masih ada lima

kementerian/lembaga di antaranya yang realisasi anggaran per 31 Agustus 2023 terkonsentrasi ketimbang periode yang sama tahun lalu. Kelima K/L tersebut yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pertanian. (KONTAN/Adinda Ade Mustami)

Realisasi Belanja 15 Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan Pagu Terbesar (Rp triliun)*



KontanInfografik

Title	Perjuangan Ihsan Yunus Dongkrak Kesejahteraan Petani Melalui Optimalisasi Perkebunan Berkelanjutan
Date	2 Oktober 2023
Media	Tribun Jambi
Page	6
Author	Tribun Jambi



Kementerian Pertanian



Caption: Ihsan Yunus (baju batik merah hitam) berfoto bersama masyarakat Tebo Ulu usai memberikan Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan.

Perjuangan Ihsan Yunus Dongkrak Kesejahteraan Petani Melalui Optimalisasi Perkebunan Berkelanjutan

Jambi – Diamatkan duduk di Komisi 4, Anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi, M. R. Ihsan Yunus, BA, B, Comm, ME.Con, makin gencar berjuang mendongkrak kesejahteraan petani di Provinsi Jambi, salah satunya melalui program Optimalisasi Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan.

Bahkan, Anggota DPR RI dua periode itu turun langsung memberikan Bimbingan Teknis Optimalisasi Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan, di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, pada akhir Agustus lalu.

Kehadiran politisi PDIP itu disambut antusias masyarakat, turut hadir dalam kegiatan ini Penjabat Bupati Tebo Arpan, Kepala Dinas Perkebunan Tebo, dan Kepala Desa se-Kecamatan Tebo Ulu.

Program ini dibawa Ihsan dari Senayan, berkat kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang merupakan mitra kerja Komisi 4 DPR RI.

Ihsan mengatakan, Perkebunan Berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi terhadap perubahan teknologi dan kelembagaan, sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemenuhan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dirinya juga mengatakan upaya inovasi terutama terkait dengan pemanfaatan dan mengoptimalkan lahan perkebunan yang saat ini masih belum dilakukan optimalisasi.

"Kiranya nanti dapat didukung oleh pihak-pihak terkait. Hal ini guna mengembangkan potensi perkebunan di Jambi yang harus terus ditingkatkan dan berinovasi," kata Ihsan Yunus di hadapan masyarakat.

"Kita harus melakukan dan menyampaikan upaya inovasi, terutama terkait dengan bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan perkebunan yang saat ini masih

belum dilakukan optimalisasi," kata Ihsan menambahkan.

Dirinya berharap semua pihak terkait bisa memberikan dukungan penuh dan bersama-sama membesarkan sektor perkebunan di Jambi, khususnya di Kabupaten Tebo.

Dikatakannya, pembangunan Perkebunan Berkelanjutan saat ini terus ditingkatkan melalui pembangunan perluasan komoditas serta peningkatan produktivitas perkebunan, di antaranya rehabilitasi dan pememajaan.

"Dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani, saya terus berjuang untuk memperhatikan peran kelembagaan petani dengan memberikan dorongan dan motivasi untuk mengembangkan usahanya," kata Ihsan menegaskan.

Ihsan juga mengatakan, ini adalah titik awal kesuksesan program-program pertanian dan perkebunan yang telah digariskan oleh pemerintah. Bimtek ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian proses perkebunan, mulai dari tahap hulu hingga hilir, dilakukan secara benar dan efisien guna mencapai hasil yang optimal. Proses ini mencakup pemilihan bibit, pemupukan, pemeliharaan, hingga tahap panen dan penjualan.

Salah satu fokus utama dari Bimtek Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan adalah memberikan akses yang lebih mudah bagi petani untuk menghasilkan kebun yang berkualitas, berkelanjutan, efektif, dan efisien.

Program ini menyentuh berbagai aspek dalam proses pertanian dan perkebunan, dan pemerintah daerah siap memberikan dukungan dalam setiap tahapan. Selain itu, tujuan akhir dari program ini adalah agar semua petani, yang merupakan 80 persen dari demografi Jambi, dapat menjalankan usaha pertanian secara berkelanjutan hingga generasi-generasi berikutnya.

Bimtek Pengelolaan Perkebunan

Berkelanjutan juga berfungsi sebagai langkah sosialisasi terhadap beragam program bantuan pertanian dan perkebunan yang ditawarkan oleh pemerintah. Program ini mencakup berbagai aspek dalam alur proses pertanian, antara lain:

1. Benih Bersertifikat: Petani akan memiliki akses untuk mendapatkan benih bersertifikat dari pemerintah, yang dijamin berkualitas dan sesuai standar.
2. Pengelolaan Tanah: Program ini juga akan membahas pengelolaan tanah, khususnya pada tanah yang telah kehilangan kandungan haranya. Solusi organik akan menjadi fokus dalam memulihkan produktivitas tanah yang selama ini mengandalkan pupuk sintetis.
3. Akses Pupuk Organik: Petani akan diberikan akses kepada pupuk organik yang dapat memulihkan produktivitas pertanian di tanah yang telah kehilangan zat hara akibat penggunaan pupuk sintetis.
4. Program Penjualan dan Promosi: Program ini akan memberikan wawasan tentang strategi penjualan dan promosi yang dapat memotong rantai penjualan dan meningkatkan keuntungan petani.
5. Pembagian Alat dan Mesin Pertanian: Sebagai bagian dari Bimtek ini, pemerintah daerah juga akan membagikan alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas petani.

"Bimtek Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada petani di Jambi, sehingga mereka dapat mengelola usaha pertanian mereka dengan lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik pula," kata Ihsan.

Ihsan Yunus merupakan Anggota DPR RI dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024 dari PDIP melalui daerah pemilihan Jambi. Politikus muda kelahiran April 1978 ini memiliki pengalaman panjang di Senayan. Ia pernah di Komisi 6, Pimpinan di Komisi 8, Komisi 2 dan sekarang di Komisi 4. (*)

Title	1.276 Hektare Lahan Terdampak Kekeringan	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Satelit News	
Page	7	
Author	Alfian/gatot	

1.276 Hektare Lahan Terdampak Kekeringan

SATELITNEWS,TANGERANG— Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang menyatakan 1.276 hektare lahan pertanian mengalami dampak kekeringan akibat el nino. Meski demikian, 4.747 hektare lahan masih dapat ditanami padi.

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno berdasarkan data per 19 September tahun 2023, dari 1.276 hektare lahan yang terdampak kekeringan, 590 hektare diantaranya masuk ke kategori kekeringan ringan. Kemudian 335 hektare kekeringan sedang, 207 hek-

tare kekeringan berat dan 144 hektare mengalami puso (gagal panen).

Untuk mengatasi masalah kekeringan, pihaknya mengajukan beberapa program bantuan sarana pendukung penyediaan air dari pemerintah pusat. Misalnya, pengajuan sumur di 148 titik, pompa air 6 inci itu 15 unit, pompa air 4 inci 31 unit, pompa air 3 inci 12 unit. Selain itu, Asep mengatakan, pihaknya mengajukan bantuan berupa benih padi untuk tanaman seluas 4.747 hektar di lahan terdampak kekeringan tersebut.

"Sebelumnya kami juga telah

membagikan bantuan benih yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian sebanyak 25 ton di 22 desa. Kami juga telah membagikan 5 unit pompa air yang juga bersumber dari dana Kementerian," ujar Asep dikutip dari website resmi Pemkab Tangerang.

Menurut Asep, total wilayah yang terkena dampak kekeringan ini meliputi 24 Kecamatan. Kekeringan, kata dia, berpengaruh terhadap hasil produksi dan naiknya harga gabah.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Provinsi Banten dan Kementerian untuk menangani per-

masalahan ini," kata dia.

Sejumlah upaya yang juga dilakukan DPKP adalah monitoring kondisi lahan yang terdampak. Selain itu, DPKP juga mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air seperti pompa dan sumur kepada Kementerian Pertanian.

"Yang pasti untuk monitoring (lahan pertanian) kami terus lakukan. Untuk langkah yang sedang kami lakukan saat ini adalah mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air, seperti pompa air dan sumur pantek," katanya. **(alfian/gatot)**



ILUSTRASI: Seorang petani memanen padi. Sebanyak 144 hektare sawah di Kabupaten Tangerang gagal panen.

Title	Bupati Sidrap Puji Prestasi Pandiari	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Fajar Makassar	
Page	15	
Author	Iad	

Bupati Sidrap Puji Prestasi Pandiari

Juara I Nasional Inseminator Terbaik

SIDRAP, FAJAR— Petugas Inseminator Kecamatan Panca Rijang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidrap, Pandiari, S.Pt., meraih penghargaan Juara I Nasional Inseminator Terbaik Kategori Wilayah Dominan Kawin Alam.

ATAS prestasi tersebut, Bupati Sidrap H. Dollah Mando menyampaikan pujian dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pandiari, sebagai petugas inseminator yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sidrap.

"Teruslah tingkatkan kinerja, layani peternak dengan tulus. Dengan pelayanan inseminasi buatan, Sidrap dapat menghasilkan sapi sapi berkualitas," pesan Dollah saat menerima Pandiari di ruang kerjanya, Jumat (29/9/2023).

Pandiari bertemu Bupati Sidrap didampingi Kadis Peternakan dan Perikanan, Samuel K, beserta jajarannya dan para petugas inseminator.

Disebutkan Pandiari, salah satu indikator penilaian bagi petugas inseminator berprestasi adalah dengan melihat jumlah layanan Inseminasi Buatan (IB) dengan jumlah kebuntingan dan kelahiran ternak.

Sebagai informasi, Pandiari, S.Pt menerima penghargaan tersebut (22/9/2023) lalu pada peringatan Bulan Bhakti Peternakan dan



MEMBANGGAKAN. Pandiari bertemu Bupati Sidrap, Dollah Mando didampingi Kadis Peternakan dan Perikanan, Samuel K, beserta jajarannya dan para petugas inseminator di ruang kerja bupati, Jumat (29/9/2023).

Kesehatan Hewan Tahun 2023 di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Penghargaan tersebut merupakan penghargaan dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan Ke-

mentrian Pertanian yang diberikan kepada petugas Inseminator terbaik.

Pemberian penghargaan tersebut untuk memberikan apresiasi serta meningkatkan semangat dan kinerja

dari petugas inseminasi buatan/kawin suntik dalam memberikan layanan kepada peternak, untuk meningkatkan produksi serta produktifitas ternak sapi dan kerbau. (* /iad)



Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Peternak Desak Buka Lalu Lintas Hewan dari Lampung	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Batam Pos	
Page	6	
Author	Slamet Novasusanto & Gustia Benny	

Peternak Desak Buka Lalu Lintas Hewan dari Lampung

Reporter : SLAMET NOVASUSANTO
EDITOR : GUSTIA BENNY

BINTAN (BP) - Sejumlah peternak sapi dan kambing di Bintan mengeluhkan akses masuk hewan ternak baik sapi dan kambing dari luar khususnya dari Lampung ditutup.

Hal ini mempengaruhi pendapatan peternak hingga peternak banyak yang hampir gulung tikar.

Salah seorang peternak sapi di Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebang, Satiman, menyampaikan, sebaiknya pemerintah memahami keluhan dari peternak.

Karena ketika sapi dari Lampung ditutup, banyak peternak Bintan yang hampir gulung tikar hingga mengancam ekonomi peternak.

Karena itu, peternak mendesak Pemerintah Provinsi Kepri melalui Satgas Penanganan PMK Kepri untuk segera membuka lalu lintas hewan, khususnya sapi dan kambing dari Lampung ke Kabupaten Bintan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bintan, Khairul, mengatakan, telah menerbitkan surat Nomor: B/321/524/IX/2023 tanggal 22 September 2023, perihal laporan situasi status Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Bintan.

Surat ditujukan kepada Sekda Bintan selaku Ketua Satgas PMK Bintan pada Jumat, 22 September 2023 lalu.

"Inti dari surat itu adalah menyampaikan situasi terkini dari perkembangan PMK di Bintan dan menyampaikan adanya perubahan status PMK Kabupaten Bintan dari daerah bebas menjadi daerah terduga," katanya.

Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Bintan, drh Iwan Berri Prima menambahkan dengan adanya perubahan status dan situasi PMK di Provinsi Kepulauan Riau, maka surat edaran Sekretaris Daerah Kepulauan Riau atas nama Gubernur Kepri Nomor: B/524.3/1/DKP2KH-SET/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang lalu lintas hewan



SEORANG warga memberi makan sapi yang ada di kandang peternak di Kampung Sungai Jeram, Desa Lancang Kuning, Bintan, beberapa waktu lalu.

rentan penyakit mulut dan kuku dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku di Provinsi Kepri yang menutup atau melarang seluruh pemasukan hewan rentan PMK dari daerah wabah dan daerah terduga, tidak relevan dan perlu dilakukan

perubahan.

"Perubahan situasi ini sebaiknya juga diikuti dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kepri," jelasnya.

Dia menyebutkan, mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun

2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

(Satgas PMK) Nomor: 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan bahwa Diperbolehkan melululintas Hewan Rentan PMK dari Daerah Tertutup PMK menuju Daerah Bebas PMK, Daerah Terduga PMK, dan Daerah Wabah; dan dari Daerah Wabah PMK menuju seluruh Daerah dengan syarat mengikuti Protokol Lalu Lintas Hewan Rentan PMK.

Hingga saat ini, kata dia, tidak ditemukan kasus klinis dan hasil pengujian laboratorium (PCR) yang menyatakan positif PMK di Kabupaten Bintan.

Dia juga mengatakan, telah dilaksanakannya program vaksinasi PMK terkait kebutuhan akan perekonomian masyarakat peternak.

"Semoga ada solusi dan opsi pembukaan lalu lintas hewan rentan PMK," ujarnya. Menurut dia, lebih baik dilakukan pembukaan dengan berbagai syarat atau sesuai

dengan protokol kesehatan PMK.

"Dari pada dibiarkan ditutup tetapi banyak pemasukan ilegal yang justru membahayakan bagi kesehatan hewan di daerah," kata pria yang menjabat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Bintan pada DKPP Kabupaten Bintan ini.

Wakil Bupati Bintan Abdi Muqith menyampaikan kewenangan pembukaan atau penutupan antarprovinsi merupakan kewenangan dari provinsi.

"Karena ini kebutuhan masyarakat, kita akan membantu masyarakat," katanya.

Sementara itu, Sekda Bintan, Ronny Kartika menegaskan Pemkab Bintan akan senantiasa mendengarkan segala keluhan dan segera membuat surat permohonan kepada Satgas PMK Provinsi untuk melakukan pembukaan lalu lintas hewan.

"Pak Bupati dan Pak Wabup akan jemput bola untuk berkoordinasi dengan Pemprov Kepri dan Kementerian Pertanian," tegasnya. (*)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Tren Positif Program Makmur Petrokimia Jatim Sebagai Lumbung Gula Nasional	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Harian Bhirawa	
Page	10	
Author	Kim.bb	

Tren Positif Program Makmur Petrokimia Jatim sebagai Lumbung Gula Nasional



Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Zuriyati Simbolon (empat dari kanan), Direktur Transformasi Bisnis ...y (dua dari kanan), Dirut PG, Dwi Satriyo Annurogo (tiga dari kanan beserta pejabat terkait saat Panen Tebu Program Makmur.

Gresik, Bhirawa
Program makmur petrokimia, dalam rangka mempertahankan posisi Jawa Timur. Sebagai lumbung gula nasional, berkolaborasi dengan Pabrik Gula (PG) Rajawali I. Hasil panen musim tanam 2022-2023, mencapai 112 ton per Hektare (Ha), atau meningkat sekitar 9,4 persen dibandingkan produktivitas petani tebu sebelumnya, yaitu hanya 102,4 ton/Ha.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo mengatakan, bahwa data Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia menyebutkan. Tahun 2022 produksi gula di Jawa Timur mencapai 49,55 persen atau sebanyak 1,19 juta ton, dari total produksi gula nasional yang berada di angka 2,4 juta ton. Melalui program makmur komoditas tebu salah satunya di Malang, yang merupakan lumbung gula Jawa timur. Mampu berkontribusi positif, terhadap peningkatan produktivitas gula nasional.

"Dampak positif lainnya dari peningkatan hasil panen, pendapatan petani pun turut bertambah menjadi Rp 105 juta untuk setiap hektarnya. Dari sebelumnya hanya memperoleh Rp 96 juta, ada peningkatan pendapatan sebesar Rp 9 juta per hektare,"ujarnya.

Pada tahun ini petrokimia, mendapatkan amanah untuk menjalankan program makmur di lahan seluas 99.000 Ha dengan berbagai komoditas. Hingga akhir Agustus 2023 kemarin, telah berhasil merealisasikan Program

Makmur seluas 102.589 Hektare (Ha). Arah 104 persen dari target, sedangkan khusus pada komoditas tebu, telah terealisasi di lahan seluas 35.481 Ha. Realisasi tersebut salah satunya berhasil dicapai, melalui kerjasama dengan PG Rajawali I di Malang.

Ditambahkan Dwi Satriyo Annurogo, bahwa dalam program ini, bertugas menjamin pasokan pupuk komersil dan melakukan pendampingan budidaya. Mulai dari layanan nobil uji tanah, hingga penyediaan pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Petrokimia Gresik, akan terus mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, salah satunya melalui program makmur.

Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Zuriyati Simbolon menga-

takan. Program ini lahir atas kesadaran bersama, upaya dalam membangun ekosistem. Program makmur bukan hanya untuk tebu, juga berfokus pada padi, jagung, dan kopi. Berhasil meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, maka tidak menutup kemungkinan akan diterapkan di komoditas pangan lainnya.

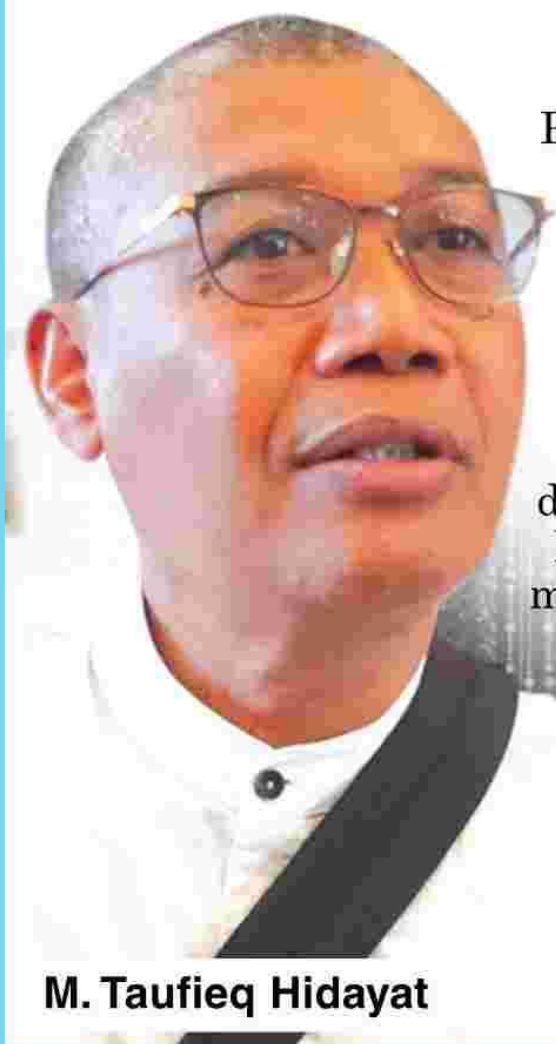
Sementara Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama ID FOOD atau induk holding RNI mengatakan. Bahwa mendukung kesuksesan program makmur melalui inovasi, seperti mekanisasi membantu petani menaiki tebu ke atas truk dengan mudah. Inovasi petrokimia yaitu penggunaan pupuk ZA Plus dan NPK Phonska Plus, dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk ZK, dimana hasilnya juga lebih baik. [kim.bb]

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	NTB Berupaya Perketat Alih Fungsi Lahan	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Suara Ntb	
Page	1 Part 1	
Author	Ris	

NTB Berupaya Perketat Alih Fungsi Lahan



M. Taufieq Hidayat

Mataram (Suara NTB) - Pemprov NTB mengajak Pemda kabupaten/kota untuk berupaya memperketat alih fungsi lahan yang masih terus berlangsung. Terlebih masalah alihfungsi lahan ini juga menjadi perhatian Kementerian Pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, salah satu upaya mempertahankan lahan pertanian yaitu dengan alihlokasi lahan.

Jika lahan di kawasan perkotaan banyak difungsikan untuk perumahan,
Bersambung ke hal 7

Title	NTB Berupaya Perketat Alih Fungsi Lahan	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Suara Ntb	
Page	1 Part 2	
Author	Ris	

NTB Berupaya Perketat Alih Fungsi Lahan

Dari Hal. 1

perkantoran dan infrastruktur maka bisa dialihkan lahan pertanian tersebut di daerah lain dengan membuka lahan baru.

“Kemarin kita sudah melakukan rapat nasional agar alihfungsi lahan pertanian itu betul-betul diperketat. Sehingga ada alihfungsi lahan, ada alihlokasi lahan,” kata Muhammad Taufieq Hidayat kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, ada sejumlah daerah di NTB yang sudah memiliki Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan yang digunakan untuk mengerem laju alihfungsi lahan serta menjamin ketersediaan lahan pertanian. Misalnya di Kota Bima, salah satu ketentuannya yaitu jika ada pihak yang menggunakan lahan pertanian, maka harus disediakan dua hektare penggantian.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB Ni Nyoman Darmilaswati sebelumnya mengatakan salah satu tantangan pengendalian alihfungsi lahan di Provinsi NTB yaitu belum semua kabupaten/kota memiliki Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Beberapa daerah yang sudah memiliki regulasi tersebut yaitu Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur.

Ia mengatakan, di tahun 2023 ini ada tiga daerah yang akan menyusun Raperda LP2B yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Dompu. Namun sayangnya anggaran untuk penyusunan Raperda tersebut ditarik oleh Kementerian Pertanian. Hal ini pula yang disampaikan Distanbun saat bertemu dengan pejabat Kementerian Pertanian RI

bulan Agustus lalu.

Perda LP2B adalah instrumen aturan untuk mengendalikan beralihfungsinya lahan pertanian berkelanjutan. Sebab tak dipungkiri banyak kegiatan alihfungsi lahan pertanian untuk pemanfaatan yang lain seperti perumahan atau infrastruktur lainnya.

“Ada daerah yang sudah memiliki Perda LP2B, namun terkadang Pemda (kabupaten/kota) sendiri yang mengeluarkan izin untuk kegiatan alihfungsi itu,” kata Ni Nyoman Darmilaswati.

Asisten II, Setda Provinsi NTB, Fathul Gani tak nampak masih terjadi alih fungsi lahan di Provinsi NTB. Secara akumulatif, sekitar 10.000 hektare dari total 270.000 hektare lahan produksi di NTB mengalami penyusutan tiap tahunnya.

Alih fungsi lahan di NTB faktornya banyak didominasi oleh pembangunan tempat tinggal atau perumahan. Ia tidak menafikan, pembangunan perumahan ini merupakan suatu keniscayaan. Tapi paling tidak lokasinya sebaiknya diprioritaskan di lahan-lahan yang tidak produktif.

“Kita berpikirnya bukan hanya hari ini, tapi untuk masa depan anak cucu kita. Artinya ada lahan pangan berkelanjutan yang harus dipertahankan,” terangnya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri mengatakan, semua pihak diminta untuk mentaati aturan LP2B ini, sebab regulasinya sudah lama lahir. Di tingkat pusat sudah ada UU Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Nah, (jika melanggar) ini bisa dipidana dan masyarakat bisa

melaporkan oknum ke Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Kuntoro Boga Andri.

Kuntoro Boga mengatakan, arah pengaturan dari UU ini bertujuan melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus alih fungsi lahan. “Sehingga bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai peruntukan,” tegasnya.

UU tersebut juga mengatur sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian. Seperti di pasal 72, 73, dan 74 menerangkan dengan rinci denda dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran aturan.

“Yang pasti, dalam aturan ini disebutkan, setiap orang yang sengaja mengalihfungsikan lahan akan dijerat dengan tindak pidana kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 5 miliar,” paparnya.

Pemprov NTB sendiri telah memiliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 10 Tahun 2017. Dalam regulasi tersebut tercantum sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Misalnya di Pasal 54 (1) berbunyi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dipidana sesuai dengan ketentuan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selanjutnya di ayat (2) menyatakan orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula dan tidak melakukan rehabilitasi dipidana sesuai dengan ketentuan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (ris)

Title	Padi Rusak, Ratusan Petani Ajukan Klaim Asuransi	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Fajar Cirebon	
Page	1 Part 1	
Author	F-15	

Padi Rusak, Ratusan Petani Ajukan Klaim Asuransi



ILUSTRASI KEKERINGAN/FC

SUMBER, (FC).- Sebanyak 5.602 lahan di Kabupaten Cirebon yang mendapat bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) secara gratis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Pusat.

Dari ribuan peserta AUTP itu. Ratusan petani telah mengajukan klaim ke PT Jasindo pada tahap I, karena tanaman padinya mengalami kerusakan yang cukup parah. Rata-rata, penyebabnya karena kekeringan dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) alias hama.

"Rata-rata yang klaim tahap pertama, penyebab kerusakan karena kekeringan dan OPT atau hama. Seperti tikus, dan lainnya," kata Sub Koordinator Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Iwan Mulyawan.

Kata dia, dari 10 Kecamatan yang didaftarkan bantuan premi AUTP gratis. Ada lima Kecamatan yang mengajukan. Diantaranya, petani dari Kecamatan Susukan, Gegesik, Klangeran, Jamblang, dan Plered.

"Lima Kecamatan yang mengajukan tahap I. Luas lahan klaim yang sudah disetujui dan sudah disurvei oleh PT Jasindo adalah, 155,21 hektare. Tapi, belum dibayar, baru disurvei oleh Independent Loss Adjuster," ujar Iwan.

Ada juga yang belum diproses oleh PT

 Ke Halaman 7

Title	Padi Rusak, Ratusan Petani Ajukan Klaim Asuransi	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Fajar Cirebon	
Page	1 Part 2	
Author	F-15	

Padi Rusak..

Sambungan Halaman 1

Jasindo, atau baru saja diajukan pada aplikasi SIAP. Pada tahap itu, ada 18 hektare lahan pertanian mengajukan klaim.

Ia juga menjelaskan tentang daftar petani yang mendaftar AUTP swadaya. Yakni petani dari Kecamatan Kedawung, Lemahabang, Losari, Kapetakan, dan Gebang. Masing-masing dari Kecamatan tersebut pun mengajukan klaim.

"Dari 127,95 hektare lahan pertanian yang mendaftar AUTP swadaya. Ada sebanyak 42,19 hektare lahan yang mengajukan klaim. Klaim tersebut belum dibayar, baru disurvei oleh Independent Loss Adjuster. Klaim sudah diterima oleh Jasindo dan sudah dilakukan survei lokasi," jelasnya. **(F-15)**

Title	Alhamdulillah, Petani Tangerang Masih Bisa Tanam Padi	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Banten Pos	
Page	11	
Author	DZH	

Alhamdulillah, Petani Tangerang Masih Bisa Tanam Padi

TANGERANG, BANPOS - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang mengklaim masih ada lahan seluas 4.747 hektare yang dapat ditanami padi oleh para petani, meskipun saat ini tengah dilanda kekeringan imbas El Nino.

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, dalam keterangan tertulis yang diterima menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor, guna menangani permasalahan kekeringan di Kabupaten Tangerang.

"Total wilayah yang terkena dampak kekeringan ini meliputi 24 Kecamatan. Dengan terjadinya fenomena El-Nino dan kekeringan ini tentunya akan berpengaruh terhadap hasil produksi dan naiknya harga gabah. Kami akan terus berkoordinasi dengan Provinsi Banten dan Kementerian untuk menangani permasalahan ini," ujarnya, Sabtu (30/9).

Sejumlah upaya yang dilakukan DPKP adalah monitoring kondisi lahan yang terdampak. Selain itu, DPKP juga mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air seperti pompa dan sumur kepada Kementerian Pertanian.

"Yang pasti untuk monitoring (lahan pertanian) kami terus lakukan. Untuk langkah yang sedang kami lakukan saat ini adalah mengajukan bantuan sarana pendukung penyediaan air, seperti pompa air dan sumur pantek," katanya.

Berdasarkan data dari DPKP Kabupaten Tangerang per tanggal 19 September tahun 2023 ini, sebanyak 1.276 hektare lahan pertanian mengalami dampak kekeringan. Dengan rincian sebanyak 590 hektare masuk ke kategori kekeringan ringan, 335

hektare kekeringan sedang, 207 hektare kekeringan berat dan 144 hektare mengalami puso (gagal panen).

Untuk mengatasi masalah kekeringan, pihaknya mengajukan beberapa program bantuan sarana pendukung penyediaan air dari pemerintah pusat. Misalnya, pengajian

sumur di 148 titik, pompa air 6 inci itu 15 unit, pompa air 4 inci 31 unit, pompa air 3 inci 12 unit.

Selain itu, Asep mengatakan, pihaknya mengajukan bantuan berupa benih padi untuk tanaman seluas 4.747 hektar, di lahan terdampak kekeringan tersebut.

"Sebelumnya kami juga telah membagikan bantuan benih yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian sebanyak 25 ton di 22 desa. Kami juga telah membagikan lima unit pompa air yang juga bersumber dari dana Kementerian," tandasnya. (DZH)



Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno.

Title	Ekspo Pertanian Terbesar, Target 7.000 Pengunjung	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Solopos	
Page	5	
Author	Tri Rahayu	

KTNA SRAGEN THE EXPORIENCE 2023

Ekspo Pertanian Terbesar, Target 7.000 Pengunjung

TRI RAHAYU

SRAGEN — Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen akan menggelar acara bertajuk KTNA Sragen The Exporience 2023 di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen pada Kamis-Sabtu (5-7/10/2023). Ekspo pertanian terbesar di Sragen itu ditargetkan menghadirkan 7.000 pengunjung.

Pameran pertanian dua tahunan itu akan jadi kali keempat yang diadakan KTNA Sragen sejak 2016. Untuk agenda 2024 dimajukan menjadi 2023 ini.

Penanggung jawab stan Panitia KTNA Sragen The Exporience 2023, Sutardi, mengungkapkan stan dalam ekspo itu terbagi menjadi stan utama sebanyak tiga unit, stan *indoor* 49 unit, dan stan *outdoor* delapan unit.

Sebanyak 49 stan *indoor* di antaranya akan diisi oleh 20 KTNA tingkat kecamatan, enam kelompok tani wanita (KTW), dan Asosisasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Sragen. Selain itu oleh KTNA Kabupaten Sragen, Lazismu, properti, BPJS Ketenagakerjaan, dan sisanya untuk formulator di Sragen.

"Nanti untuk stan kuliner ada delapan unit. Kami berharap para formulator di Sragen dapat ber-

kontribusi dalam ekspo pertanian terbesar di Sragen ini. Seperti formulator produk dari PT Catur Agrodasya Mandiri (UPL Indonesia), PT Buyer, PT Tunas Agro, dan formulator lainnya," ujarnya.

Sejumlah pihak yang sudah memastikan bergabung dalam ekspo di antaranya PT Mitra Kreasi Darma, PT Agrimakmur Pertiwi, dan PT Saprotan Utama. Selain itu PT Java Green, PT Darma Guna Wibawa, PT Bisi, PT Biotis, PT Indotani, PT Sigenta, dan PT Global Nutri Agrinusa. Ekspo tersebut juga didukung PT Pupuk Indonesia, Perum Bulog dan PT Maxi Indonesia Mandiri.

Ketua KTNA Sragen, Suratno, menjelaskan ekspo edisi keempat ini sedianya digelar 2024. Berhubung tahun depan merupakan tahun politik, ekspo dimajukan pada 2023 ini.

"Kami mengusung tema *Menuju Kedaulatan Pangan Indonesia dan Rembug Paripurna*. Ekspo ini diharapkan bisa melahirkan kebijakan pertanian yang berpihak kepada kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Dalam ekspo itu nanti diharapkan juga terbentuk kerja sama antarpemangku kepentingan di sektor pertanian dalam arti luas," ujar Suratno.

Maksud dari pertanian dalam arti luas itu mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Suratno mengatakan ekspo ini juga supaya terjadi transaksi ekonomi antara konsumen dan produsen, konsumen dan industri pertanian



Sejumlah petani berfoto di depan spanduk KTNA Sragen The Exporience 2023. Mereka antusias menyambut ekspo pertanian terbesar di Sragen itu. Foto diambil Sabtu (30/9/2023).

serta aneka produk lainnya. Dia menginginkan dalam forum ekspo itu petani bisa berbagi cerita tentang keberhasilan dan kegagalan mereka.

"Ekspo ini diadakan lantaran keberhasilan ekspo di 2022. Pada tahun lalu, KTNA ekspo bisa terjadi transaksi ekonomi pertanian dan menghasilkan kerja sama antara KTNA dan pemangku kebijakan serta produsen pertanian. Kami menargetkan bisa mendatangkan 7.000 pengunjung selama tiga hari itu. Itu target minimal. Setiap pengunjung yang hadir nanti ada registrasi di gerbang masuk dan ada undian *doorprize* menarik setiap harinya," jelas Suratno.

Suratno sudah menyiapkan strategi untuk mendatangkan banyak pengunjung. Di antaranya deng-

an meminta pengurus KTNA Kecamatan mempromosikan sekaligus mendatangkan petani dari wilayah masing-masing agar hadir di pameran tersebut. Panitia juga memasang baliho dan 40 lembar spanduk di sejumlah lokasi strategis di 20 kecamatan.

Ketua KTNA Sumberlawang, Sragen, Joko Supangianto, menyampaikan ada pembagian kunjungan ke ekspo KTNA. "Jadi ada yang datang pagi, siang, dan sore. Nanti setiap pengunjung yang hadir mendapat kupon dan setiap malamnya diundi. Hadrhanya macam-macam dan ada hadiah pompa air," katanya.

Sponsor utama kegiatan ini adalah PT Pupuk Indonesia, Perum Bulog, dan PT Maxi Indonesia Mandiri. ☺

Title	Perkuat Sinergi Pengembangan Manajemen Pelatihan SDM	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Jurnal Bogor	
Page	10	
Author	Nita/BBPMKP	

Perkuat Sinergi Pengembangan Manajemen Pelatihan SDM

BBPMKP Kementan - BUTTMKP Barantin Mantap Kerjasama

Bogor | Jurnal Bogor

BALAI Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Kementerian Pertanian dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP), Badan Karantina Indonesia mantap melakukan kerjasama penguatan manajemen pelatihan SDM sebagai wujud upaya pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM. Penandatanganan kerjasama dilakukan pada Rabu (27/09) di BBPMKP Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan pengembangan SDM merupakan salah satu fokus utama di Kementan. "Pembangunan pertanian yang dilakukan Kementan akan lebih maksimal jika didukung SDM-SDM berkualitas. Oleh sebab itu, pengembangan kualitas SDM menjadi fokus utama Kementan. Kita tingkatkan kemampuan, kapasitas, dan pengetahuan SDM pertanian," kata Menteri Syahrul.

Senada dengan Menteri Syahrul, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi menyatakan guna mendukung pembangunan pertanian



ke arah maju, mandiri dan modern, maka perlu dilakukan penyiapan dan pencetakan SDM pertanian yang unggul, salah satunya melalui pelatihan.

Kerjasama pengembangan sistem manajemen pelatihan SDM yang dilakukan oleh BBPMKP Kementan dengan BUTTMKP Barantin bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui penerapan Learning Management System (LMS).

Dalam kerjasama tersebut nantinya BBPMKP Kementan akan mem-

fasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan SDM yang diselenggarakan oleh BUTTMKP Barantin serta menyediakan narasumber LMS.

Kepala BBPMKP Kementan, Yusril Tahir menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya, kerjasama ini akan membuka peluang-peluang untuk kerjasama lainnya.

"Kami menyambut baik kerjasama ini, semoga kedepannya akan ada kerjasama-kerjasama lainnya dalam hal pengembangan SDM", jelas Yusril. ■Nita/BBPMKP

Title	Awal Oktober 2023, Harga Referensi Kakao Meningkat 5,32 Persen	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Iwan/gro	

Awal Oktober 2023, Harga Referensi Kakao Meningkat 5,32 Persen

NERACA

Jakarta - Harga referensi biji kakao periode Oktober 2023 ditetapkan sebesar USD 3.622,88/MT, meningkat sebesar USD 183,16 atau 5,32 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Oktober 2023 menjadi USD 3.307/MT, naik USD 178 atau 5,7 persen dari periode sebelumnya.

Peningkatan harga ini berdampak pada BK (Bea Keluar) biji kakao, yaitu menjadi sebesar 15 persen sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 71 Tahun 2023.

"Peningkatan harga referensi dan HPE (harga patokan ekspor) biji kakao dipengaruhi adanya penurunan produksi biji kakao di wilayah Afrika sebagai sentra produsen kakao dunia akibat kekeringan sebagai dampak dari El Nino dan penyakit busuk buah serta melemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat dan poundsterling Inggris," jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Budi Santoso.

Lebih lanjut, terkait dengan kakao, Kementerian Perindustrian (Ke-

menperin) fokus untuk terus menjalankan kebijakan nasional hilirisasi industri pengolahan kakao di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Adapun pengembangan hilirisasi industri pengolahan kakao diarahkan untuk menghasilkan bubuk cokelat, lemak cokelat, makanan dan minuman dari cokelat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao, serta pengembangan cokelat artisan.

Apalagi, potensi Indonesia saat ini merupakan negara pengolah kakao ketiga terbesar di dunia yang memproduksi berbagai produk kakao olahan seperti cocoa pasta/liquor, cocoa cake, cocoa butter dan cocoa powder. Sebagian produk tersebut diolah lebih lanjut di dalam negeri (sekitar 20 persen), dan selebihnya diekspor ke lebih dari 96 negara di lima benua.

"Ekspor produk intermediate tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai pemasok rantai global dengan kontribusi sekitar 9,17 persen dari kebutuhan dunia," kata Direktur Jenderal Industri Agro, Kemenperin, Putu Juli Ardika.

Menurut Putu, peningkatan nilai ekspor kakao

olahan didukung oleh sejumlah investasi perusahaan multinasional. "Hal ini merupakan dampak dari kebijakan bea keluar terhadap ekspor biji kakao melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2010," terang Putu.

Dari investasi tersebut juga, semula kapasitas terpasang industri pengolahan kakao sebesar 560.000 ton per tahun, naik menjadi 739.250 ton per tahun. Selain itu, ekspor biji kakao pada tahun 2013 sebesar 188.420 ton (senilai USD 446 juta), turun menjadi 24.603 ton (senilai USD 64 juta) pada 2022. Sebaliknya, volume ekspor produk olahan kakao meningkat dari 196.333 ton (senilai USD 654 juta) pada tahun 2013 menjadi 327.091 ton (senilai USD 1,1 miliar) tahun 2022.

"Sejak tahun 2015, ekspor kakao olahan kita selalu di atas USD 1 miliar. Bahkan, Indonesia sudah menjadi pemain global kakao olahan, dengan posisi ekspor cocoa butter kita nomor dua di dunia setelah Belanda," ungkap Putu.

Lebih lanjut, Putu menyampaikan, lima tahun lalu komposisi ekspor kakao olahan antara (intermediate product) sebesar 85 persen, dan 15 persen diproses lebih lanjut di dalam negeri menjadi produk akhir (*finished good*)

berupa makanan dan minuman berbasis cokelat.

"Saat ini, komposisi produksi olahan cokelat di dalam negeri telah meningkat menjadi 20 persen. Artinya produk kakao olahan di dalam negeri mengalami penguatan atau terdapat hilirisasi lebih lanjut," terang Putu.

Cokelat Artisan

Sejauh ini, produk cokelat sebagian besar masih diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi cokelat per kapita di dalam negeri meningkat dari 0,37 kilogram (kg)/kapita pada tahun 2018 menjadi 0,49 kg/kapita tahun 2022.

Ekspor produk cokelat juga mengalami peningkatan dari USD 45 juta pada 2018 menjadi USD 77 juta di tahun 2022 atau naik rata-rata 14,65 persen/tahun.

"Salah satu produk cokelat yang berkembang adalah cokelat artisan bean to bar atau yang sering juga dikenal sebagai *craft chocolate*," ujar Putu.

Saat ini, terdapat 31 perusahaan atau produsen cokelat artisan dengan kapasitas 1.242 ton/tahun.

"Produk *craft chocolate* sangat digemari oleh wisatawan mancanegara dan kalangan menengah atas di dalam negeri," pungkas Putu. ● Iwan/gro

Title	Awal Oktober, Harga Referensi CPO Naik 3,57 Persen	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	1	
Author	Gro	

Awal Oktober, Harga Referensi CPO Naik 3,57 Persen

NERACA

Jakarta - Harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPDP-KS) atau biasa dikenal sebagai pungutan ekspor (PE) periode 1-15 Oktober 2023 adalah USD 827,37/metrik ton (MT). Nilai ini meningkat sebesar USD 28,54 atau 3,57persen dari harga referensi CPO periode 16-30 September 2023.

Penetapan harga referensi CPO tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1698 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Selain itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam ke-

masan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kilogram (kg) dikenakan BK USD 0/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1699 Tahun 2023 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto 25kg.

“Saat ini, harga referensi CPO meningkat menjauhi ambang batas yang sebesar USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan bea keluar (BK) CPO sebesar USD 33/MT dan pungutan ekspor CPO sebesar USD 85/MT untuk periode 1-15 Oktober 2023,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso, akhir pekan lalu.

BK CPO periode 1-15 Oktober 2023 merujuk pada Kolom Angka 4 Lampiran Huruf C Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 39/-PMK/0.10/2022 jo. Nomor 71 Tahun 2023 sebesar USD 33/MT.

Sementara itu, Pungutan Ekspor (PE) CPO periode 1-15 September 2023 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.-05/2022 sebesar USD 85/MT.

Peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu adanya peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, serta kenaikan harga minyak nabati lainnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono mengungkapkan produksi CPO pada Juli 2023 mencapai 4.357 ribu ton sedangkan PKO (palm kernel oil) mencapai 414 ribu ton sehingga total produksi adalah 4.771 ribu ton.

Angka total produksi tersebut

lebih tinggi 7,9 persen dibandingkan produksi Juni 2023 sebesar 4.421 ribu ton. Secara Year on Year (YoY), terjadi peningkatan produksi sebesar 17,4 persen atau 4.763 ribu ton dari produksi Year to Date (YTD) Juli 2022 sebesar 27.303 ribu ton, menjadi 32.066 ribu ton YTD Juli 2023. Menyatakan hal ini.

Total konsumsi dalam negeri bulan Juli 2023 tercatat sebesar 1.757 ribu ton atau lebih rendah 10,5 persen dari konsumsi pada Juni 2023, yakni sebesar 1.963 ribu ton. Penurunan ini terjadi terutama akibat berkurangnya penggunaan biodiesel sebesar 19,5 persen atau sebesar 174 ribu ton, dari 893 ribu ton pada Juni 2023 menjadi 719 ribu ton pada Juni 2023.

Kondisi serupa terjadi pada konsumsi minyak makan dan oleokimia yang mengalami kemerosotan masing-masing sebesar 3,1 persen dan 2,6 persen. Konsumsi minyak makan pada Juli

2023 sebesar 853 ribu ton dan oleokimia sebesar 185 ribu ton, sedangkan pada Juni 2023, konsumsi minyak makan sebesar 880 ribu ton dan oleokimia sebesar 190 ribu ton.

Total ekspor bulan Juli 2023 telah mencapai 3.519 ribu ton atau meningkat 2,0 persen dibandingkan ekspor pada Juni 2023 sebesar 3.450 ribu ton. Kenaikan terbesar terjadi pada ekspor CPO yang mencapai 589 ribu ton, atau naik sebesar 16,9 persen dari ekspor bulan Juni 2023 yakni sebesar 504 ribu ton. Sebaliknya, ekspor olahan CPO mengalami sedikit penurunan sebesar 3,4% dari 2.487 ribu ton pada Juni 2023 menjadi 2.403 ribu ton pada Juli 2023.

Namun, peningkatan kinerja ekspor industri kelapa sawit pada Juli 2023 tersebut menghasilkan kenaikan nilai ekspor sebesar 1,4% atau meningkat dari USD 2.877 juta pada Juni 2023 menjadi USD 2.918 juta pada Juli 2023. @gro

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Konsepси Kedaulatan Pangan Jadi Tantangan PDIP	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	2	
Author	Ali Zunair Abbas	

Konsepси Kedaulatan Pangan Jadi Tantangan PDIP

Oleh : Ali Zunair Abbas, Pengamat Pertanian

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkomitmen untuk terus membangun konsepси Indonesia maju dan sejahtera. Salah satu hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan Rakernas IV yang digelar selama tiga hari di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Adapun acara tersebut digelar mulai 29 September 2023 hingga 1 Oktober 2023 yang juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin, Capres PDIP Ganjar Pranowo, pemengaruh (influencer), selebritas, hingga sejumlah elit Pemerintahan.

Rakernas PDIP Perjuangan ke IV sendiri mengambil tema "Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat" dengan subtema "Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia". Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya pangan bagi kehidupan bangsa. Bahkan isu tersebut juga menyangkut tentang marta-

bat bangsa. Sekjen PDIP Perjuangan itu menerangkan bahwa persoalan pangan tidak serta merta berkaitan dengan lumpur dan pangan itu juga tidak berkaitan dengan kemiskinan.

Menurutnya, pangan itu berkaitan dengan harga diri, martabat, dan kepemimpinan Indonesia bagi dunia.

Terkait dengan topik Rakernas ke IV, Hasto menjelaskan bahwa PDIP ingin mengutarakan bahwa PDIP menjadi partai yang punya narasi tentang masa depan, tidak hanya mengurus tentang pencapresan semata.

Dalam forum yang digelar pada akhir September itu juga menunjukkan, PDIP menjadi partai yang siap membawa konsepси Indonesia pada masa mendatang. Hal tersebut juga yang akan menjadi fokus dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung pihaknya.

Hasto menjelaskan bahwa para Capres dan Cawapres harus memiliki konsepси tentang masa depan.

Sebab, Capres dan Cawapres yang hanya berbasis kepintaran dalam memainkan kata-kata atau berbasiskan suatu ambisi untuk mengantar kekuasaan tanpa suatu narasi tentang konsepси masa de-

pan, maka ia adalah aktor politik yang siap melakukan apapun demi elektoral.

Tak hanya itu, Hasto juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam hal ini, Presiden ke-5 RI itu terus menegaskan pesan bahwa masyarakat Indonesia bisa adil dan makmur melalui pangan.

Dalam pidatonya di Rakernas IV PDIP, Megawati Soekarnoputri menuturkan bahwa PDIP menawarkan konsepси kedaulatan pangan dalam Pemilu 2024. Ia menegaskan PDIP tidak akan menyerah dalam menjalankan politik kedaulatan pangan tersebut.

Itu merupakan komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang dengan memenangkan Pileg dan Ganjar Pranowo sebagai Presiden ke-8 RI.

Putri Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno alias Bung Karno itu juga mengingatkan kepada para kader partai, seluruh simpatisan di mana pun berada, suka rela lawan bahwa rakyat adalah cakrawati perjuangan.

Dia menyatakan bahwa PDIP telah teruji oleh gembengan sejarah yang begitu hebat dan menyakitkan khususnya ketika masa Orde Baru.

Megawatipun mengimbau

para kadernya agar tidak gentar sedikitpun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis yang hanya sekadar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan. Ia juga berpesan agar para kader PDIP berpolitik dengan seluruh semangat dan Nurani, serta setia kepada rakyat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai tema Rakernas IV PDIP sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi berpesan kepada Capres PDIP Ganjar Pranowo agar merencanakan kedaulatan pangan mulai sekarang, agar begitu menang dan dilantik bisa langsung menangani masalah tersebut, sehingga swasebada dan kedaulatan pangan bisa dimiliki Indonesia. Jokowi yakin bahwa Ganjar mampu memiliki visi taktis dalam menyelesaikan masalah tersebut jika menjadi Presiden RI pada 2024.

Dalam Rakernas IV PDIP tersebut, sejumlah pemengaruh (influencer) dan selebritas, seperti Denny Cagur, Lucky Perdana, dan Tina Toon ikut memberikan testimoni. Para selebritas tersebut akan membagikan pengalaman mereka bagaimana menghadirkan kampanye politik yang kreatif. Di sesi lainnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisar

Jenderal (Purn) Firli Bahuri menyampaikan pemaparan terkait peran partai politik dalam pengawasan dan pencegahan politik uang menjelang Pemilu serentak 2024. Sementara itu, di area pameran pangan ada talkshow dengan tema "UMKM Kuliner dan Kedaulatan Pangan". Sementara itu, Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani turut memberikan pengarahannya terkait kemenangan Pilpres dan Pileg 2024.

Disisi lain, sosok Ganjar Pranowo sendiri sudah sangat dipercaya masyarakat sebagai satu-satunya figur pemimpin yang dapat melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sebab, sosok berambut putih itu sudah berpengalaman dalam memimpin Provinsi Jawa Tengah dan terbukti menurunkan angka kemiskinan di sana. Selain itu, beliau juga terbukti dicintai rakyat, dan optimis akan menang dalam Pilpres 2024.

Rakernas PDIP IV tidak saja membahas mengenai Pilpres, Pileg, dan Pilkada, tetapi juga beragam isu strategis terkait dinamika nasional. Dengan adanya forum tersebut, maka diharapkan berbagai gagasan dan solusi atas permasalahan bangsa dapat lahir dan menjadi rujukan dalam mengatasi setiap persoalan kebangsaan.

Title	KPPU Ingatkan Distributor Agar Tidak Menimbun Beras	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	12	
Author	Ant	

KPPU Ingatkan Distributor Agar Tidak Menimbun Beras

NERACA

Makassar - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) VI Makassar Hilman Pujana mengingatkan setiap distributor agar tidak menahan atau menimbun bahan pangan, seperti beras, di tengah melonjaknya harga saat ini.

"Kita akan tetap awasi. Di sini ada Satgas Pangan dan kita harap distributor tidak menahan pasokan beras," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/9).

Hilman Pujana mengatakan kenaikan harga pada komoditi beras dipengaruhi oleh beberapa sebab, bisa karena pasokan dan juga permintaan.

Kenaikan harga, kata

dia, juga karena adanya fenomena El Nino sehingga musim kemarau lebih lama dari tahun sebelumnya, yang harusnya siklus tanam padi berjalan seperti dulu.

"Kita berharap para pelaku usaha di bidang distribusi agar tidak bermain-main, yang bisa mengganggu distribusi karena dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat," katanya.

Meski demikian ia juga sudah berkoordinasi dengan pihak Perum Bulog untuk ketersediaan beras.

Apalagi Bulog sudah memastikan stok beras yang dimilikinya masih cukup tersedia hingga akhir tahun.

Sementara itu Wakil Wali Kota Makassar Fat-

mawati mengatakan pihaknya bersama Perum Bulog telah menyiapkan 10 ton beras untuk disebar kepada masyarakat melalui operasi pasar.

"Kami siapkan 10 ton beras untuk operasi pasar. Kenaikan harga beras terasa sangat berpengaruh terhadap masyarakat.

Semoga dengan operasi pasar ini sedikit membantu," ujarnya.

Fatmawati Rusdi yang mendampingi PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengecek harga dan ketersediaan pangan di sejumlah pasar tradisional.

Hasil pemantauannya untuk harga beras medium naik dari Rp10 ribu menjadi Rp12 ribu per kilogram dan beras premium dari Rp10 ribu menja-

di Rp13 ribu per kilogram. Dengan demikian kenaikan harga beras berkisar antara Rp2-3 ribu per kilogram.

Pada dua pasar tradisional yakni Pasar Terong dan Pasar Pabaeng-baeng, selain beras, kata dia, gula, ayam potong, dan jeruk nipis juga mengalami lonjakan harga.

Ayam potong naik Rp3 ribu per ekor. Sementara harga jeruk nipis naik Rp8 ribu, dari harga Rp10 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram.

Fatmawati mengaku jika kenaikan berbagai beras dan komoditi lainnya itu dipicu oleh dampak El Nino. "Hampir semua kebutuhan masyarakat itu mengalami kenaikan dan itu dipicu oleh fenomena El Nino," katanya. ● ant

Title	Perilaku Boros Di Tengah Ancaman Krisis Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	6	
Author	Bari/ant	

Perilaku Boros Di Tengah Ancaman Krisis Pangan

NERACA

Jakarta - Krisis pangan mengancam seluruh dunia, tatkala suhu global yang semakin meningkat karena adanya fenomena el nina dan belum usainya perdagangan antar negara. Disisi lain, perilaku masyarakat terhadap pangan masih jauh diatas pemanfaatan yang maksimal mengingat masih banyaknya orang yang berperilaku boros terhadap pangan. Maka dari itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendukung penerbitan regulasi untuk mengurangi food loss dan food waste pada momentum peringatan International Day of Awareness of Food Loss & Waste.

"Badan Pangan Nasional mendukung untuk dilakukan penguatan regulasi mengubah perilaku peningkatan support sistem optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste, pengembangan kajian serta pendataan food loss and waste itu sendiri," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam acara International Day of Awareness of Food Loss & Waste di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Arief mengatakan food loss dan waste merupakan salah satu tantangan terbesar secara global dalam sistem pangan saat ini. Rilis Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menuturkan sepertiga dari pangan yang diproduksi atau sekitar 1,3 miliar ton pangan terbuang setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan Food Waste Index Report Tahun 2021 sekitar 13 persen dari total produksi pangan global mengalami food loss dan sebanyak 17 persen terbuang percuma karena perilaku boros pangan atau food waste.

Khusus untuk Indonesia, tumpukan food loss and waste di Indonesia sepanjang 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton atau setara 115-184 kg/kapita/tahun. Dari segi dampak ekonomi mencapai Rp213-551 triliun per tahun dan setara dengan potensi penggunaan 61-125 juta orang atau 29-47 persen. "Dalam peta ketahanan dan kerawanan pangan serta indeks kerawanan pangan tahun 2022, masih ada wilayah di Indonesia yang rawan pangan dan memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah. Hal ini menjadi perhatian kita bersama agar mengelola dan menurunkan food loss and waste karena masih banyak penduduk Indonesia yang butuh makanan," ucap Arief.

Lebih lanjut Arief menyampaikan berdasarkan piramida hierarki upaya penyelamatan pangan, fokus utama diprioritaskan pada aksi mencegah terjadinya food waste. Prioritas kedua yaitu pada tahapan mendonasikan pangan berlebih sekiranya tidak bisa diselamatkan lagi.

Ketiga, pemanfaatan pangan untuk pakan, jadi bedanya pangan dan pakan kalau pangan buat manusia, pakan buat hewan. Lalu, pemanfaatan untuk industri dan berikutnya kompos dan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir.

"Bapanas telah mengedepankan tiga langkah dalam menjaga ketahanan pangan, better nutrition, better behavior dan better collaboration. Oleh karena itu di Indonesia Bapanas memprakarsai gerakan selamatkan pangan menuju zero waste to end hunger," tegasnya.

Ancaman krisis pangan kerap disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jokowi menyebut sekitar 22 negara saat ini sudah menyatop ekspor pangan. Bahan pangan yang disatop ekspornya meliputi gandum, gula, dan beras.

Presiden mencontohkan negara-negara yang mengambil keputusan menyatop bahan pangan mereka. "Ada Uganda, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar," kata Jokowi.

Kepala Negara menitipkan pesan kepada kandidat yang melanjutkan kepemimpinannya terkait visi taktis. Rencana detail mesti dapat dimiliki dan disiapkan dalam 5-10 tahun ke depan. Jokowi mengatakan baru ada tambahan 61 waduk tahun depan. Sehingga, kurang lebih ada 300 waduk di Indonesia.

"Masih sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan Korea, dengan China, belum ada 10 persennya kita.

Artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki," ujar Jokowi. ●bari/ant

Title	Pembentukan Ekosistem Industri Tanaman Hias Didorong	 Kementerian Pertanian
Date	2 Oktober 2023	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Rin/gro	

Pembentukan Ekosistem Industri Tanaman Hias Didorong

NERACA

Tangerang - Menteri Koperasi dan UKM (Men-KopUKM) Teten Masduki mendorong pelaku industri tanaman hias untuk membentuk ekosistem yang nantinya bisa meningkatkan pertumbuhan volume dan nilai penjualan baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.

Nilai ekonomi pada industri tanaman hias di Indonesia cukup kuat dengan volume dan nilai ekspor yang terus meningkat rata-rata 10 persen per tahun. Namun potensi pasar ekspor belum seluruhnya tergarap optimal. "Berbagai keterbatasan membuat Indonesia hanya mampu meraih 0,1 persen dari global market value tanaman hias yang mencapai USD 22,329 miliar," kata Teten di Tangerang.

Teten mengatakan saat ini setiap negara sedang mencari hal yang menjadi keunggulan domestiknya. Contohnya Norwegia salah satunya, negara itu tidak lagi mengandalkan pendapatan dari sektor migas yang eksploitatif, melainkan dari budidaya ikan salmon yang berkelanjutan. "Kita ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tanaman hias, agrikultur, dan akuakultur. Karena itu saya senang kalau acara FLOII ini sedang dirintis menjadi event dunia," ucap Teten.

Lebih lanjut Teten mengatakan Indonesia selain memiliki kekayaan biodiversitas, Indonesia juga menjadi sumber talenta dalam industri tanaman hias. Jika menggunakan value Sustainable Development Goals (SDGs), Teten menegaskan industri ini memenuhi konsep 3P (Profit, People, dan Planet).

"Selain mencari profit, kita juga memberdayakan masyarakat, kita juga turut menyelamatkan lingkungan," ucapnya.

Menteri Teten berharap industri tanaman hias dapat dihubungkan ke platform digital, sehingga dapat memasuki pasar global melalui penggunaan teknologi modern. "Transformasi digital harus masuk ke sektor produksi seperti industri tanaman hias ini. Ekosistem itu harus kita bangun," ujarnya.

Peluang Pasar

Teten pun menguraikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor tanaman hias Indonesia pada tahun 2021 mencapai 20.300 ton. Sedangkan Volume ekspornya juga meningkat 11,5 persen atau 2.100 ton dibandingkan ekspor tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada nilai ekspor dari 19,9 juta dolar AS pada 2020 menjadi 21,9 juta dolar AS pada 2021 atau meningkat 10 persen.

Dengan besarnya peluang ekspor tanaman hias dan dalam rangka mencapai misi Indonesia Emas di tahun 2045, diharapkan kedepan nilai ekspor ini dapat meningkat dari tahun ke tahun dan nilai impor semakin menurun.

Teten menjelaskan, ada beberapa negara utama tujuan ekspor tanaman hias Indonesia, seperti Jepang, disusul Singapura, Belanda, Amerika, China, Korea Selatan, Malaysia, dan Kanada dengan jenis tanaman antara lain tanaman krisan, Saintpaulia, Upphorbia, Lilium, Philodendron, dan Lomandra.

Dan berdasarkan data Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Barantan Kementan) pada 2021, jenis ekspor

didominasi beragam benih hortikultura, baik dalam bentuk biji maupun tanaman hias, senilai Rp80 miliar.

Dengan besarnya peluang kebutuhan tanaman hias dari Indonesia ini maka menjadi peluang bagi pelaku usaha tanaman hias agar dapat berinovasi untuk pengembangan budidaya tanaman hias. Diluar negara-negara tersebut, masih ada peluang ekspor ke negara lainnya seperti Saudi Arabia yang banyak membutuhkan tanaman untuk proyek Saudi Green.

"Saya berharap peluang yang besar tersebut dapat dipenuhi oleh pelaku usaha tanaman hias Indonesia dengan meningkatkan jumlah produk tanaman hias untuk memenuhi kebutuhan ekspor," kata Menteri Teten.

Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk pengembangan industri florikultura ini dan peran Perhimpunan Florikultura Indonesia (PFI) sangat strategis dalam mendorong kemajuan agribisnis florikultura Indonesia. Terkait dengan tanaman hias, sebelumnya Sebanyak 74 batang bibit dan umbi caladium berbagai corak diekspor oleh Maria Sari Nindy asal Lemahputro, Sidoarjo. Ekspor senilai 860 ribu rupiah dikirim ke Gauteng, Afrika Selatan melalui jasa ekspedisi di Bandara Juanda.

Sumanto selaku Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan bibit dan umbi caladium. "Tidak ditemukan gejala serangan nematoda Radopholus similis pada akar dan umbi serta tidak ditemukan gejala serangan serangga Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Spodoptera litura, dan Tetranychus cinnabarinus," terang Sumanto. ● rin/gro